



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS KONDISI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI SUMATERA BARAT

SKRIPSI



RESTYA OKTARINA
06151088

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama : Restya Oktarina
No. BP : 06151088
Program Studi : S-1 (Strata 1)
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Judul skripsi : Analisis Kondisi dan Kebijakan Pembangunan Daerah
Tertinggal di Sumatera Barat

Telah disajikan dalam seminar Jurusan Ilmu Ekonomi dan disetujui oleh Pembimbing Skripsi.

Padang, Agustus 2010

Pembimbing

Drs. Lukman, MSi
NIP.196411231993031003

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas**

**Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas**

Prof.DR. H. Syafruddin Karimi, SE, MA
NIP.195410091980121001

Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE.M.Ec.DEA.Ing
NIP. 130 812 952



No. Alumni Universitas

**RESTYA
OKTARINA**

No. Alumni Fakultas

BIODATA

a)Tempat/tanggal lahir : Padang/29 Oktober 1988 b) Nama Orang Tua : Tamsir Bakti Utomo,SPd dan Endah Purwaning Rahayu,Amd c)Fakultas : Ekonomi d)Jurusan : Ilmu Ekonomi e)NO BP : 06151088 f)Tanggal Lulus : 24 Agustus 2010 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h)IPK : 3,29 i)Lama Studi : 4 Tahun h)Alamat Orang Tua : Jl.Merpati IV No.11 Komp.Pondok Permai Gadut, Padang

ANALISIS KONDISI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI SUMATERA BARAT


Skripsi S1 oleh Restya Oktarina Pembimbing Drs. Lukman, MSi

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang kondisi dan kebijakan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 07 dan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemeneq PDT) Nomor 001 terdapat 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat. yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Solok, Pesisir Selatan, Sawahlunto/Sijunjung, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat. Faktor – faktor yang menyebabkan keteringgalan tersebut adalah faktor geografis, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, kondisi pertumbuhan ekonomi yang lambat dan kemiskinan, sarana dan prasarana yang terbatas, daerah rawan bencana dan konflik sosial serta efek kebijakan pembangunan yang tidak tepat. Metodologi yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah Metode *Location Quotient* (LQ) dan Analisis SWOT. Berdasarkan pembahasan dengan menggunakan Metode LQ dan Analisis SWOT maka kebijakan yang diperlukan untuk pembangunan daerah tertinggal adalah pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan fungsi kelembagaan dan pengembangan sarana dan prasarana.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 24 Agustus 2010

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1. 	2.	3.
Nama Terang	Drs. Lukman, MSi	Drs. Yusrizal Yulius, MA	Dra. Wahyuni Eloisa Marinda, ME

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec,DEA,Ing

NIP: 130 812 952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*"Allah akan meninggikan orang - orang yang beriman
diantara kalian dan orang - orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat ". (QS. AL -
Mujaadilah: 11)*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Atas semua rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan...

Satu langkah keberhasilan telah kuraih...

Satu asa telah kugapai...

Ini bukanlah akhir, melainkan awal...

Masih banyak deretan langkah yang harus kuhadapi...

Ya Allah....

Tunjukkanlah aku jalan yang lurus...

Tuntunlah, berkahilah dan ridhoilah seluruh langkah hidupku...

Semoga apa yang kuperbuat bisa memberi arti dan manfaat dalam

Hidupku dan orang - orang yang berada di dekatku...

Amin.....!

Kupersembahkan skripsi ini kepada Papa Tamsir Bakti Utomo,SPd dan Almarhumah Mama Endah Purwaning Rahayu,Amd tercinta, Abang serta adikku tersayang Restu Agung Permana, A.md dan Dhimas Afif Fauzan,Tante Yusit dan keluarga,my huny,serta teman2 terbaikk sebagai sebuah hasil usaha dan kerja kerasku selama ini serta tanda bakti dan pengabdianku. Takkan dapat kubalas jasa mereka, semoga rahmad dan hidayah illahi selalu menyertai kita serta ini menjadi awal kesuksesan bagiku. Amin.....!

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada berhingga kepada :

1. Mama Endah Purwaning Rahayu yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, Papa Tamsir Bakti Utomo, SPd yang selalu menjadi figur ayah yang sempurna dan selalu sabar serta bijaksana dalam mendidik penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil, abang Restu Agung Permana Amd, Adikku tersayang Dhimas Afif Fauzan. *Semoga kita selalu berada dalam lindungan ALLAH SWT.... Amin.*
2. Bapak Drs. Lukman, Msi selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di sela – sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Drs. Yusrizal Yulius, MA dan Ibuk Dra Wahyuni Eloisa, ME selaku pembahas skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan bersedia jadi pembahas dalam acara seminar hasil skripsi.
4. Bapak DR. H. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M. Ec. DEA. Ing selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
6. Bapak Febriandi Prima Putra SE, M. Si selaku Kepala Program Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas, yang telah banyak menolong penulis dari awal pembuatan skripsi sampai penulis melaksanakan seminar hasil skripsi. Sungguh semua pertolongan bapak tidak pernah penulis lupakan.
7. Pak Asman, Ni Nel, Buk Syam, Pak Oyon serta Da Ujang yang telah memberikan kemudahan dan bantuan administrasi kepada penulis.
8. Tante Yusit yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh limpahan kasih sayangnya serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dengan tiada henti-hentinya. Om In yang selalu menjadi suami yang sabar untuk tanteku, Sepupuku tercinta Vanny dan Dinda. Kejarlah mimpimu, raih cita-cita mu. *Semoga kamu menjadi orang yang berhasil kelak ya dek...*

9. My huny Feru ^^ ,terimakasih cinta.. Untuk segalanya..tiada kata yang dapat kulukiskan tentang arti dirimu hun. Kamu yang terbaik untukku. Do'aku selalu menyertaimu. Jangan pernah berubah huny^^.

10. My beloved friend

- Ilep n Meri,terimakasih atas persaudaraan yang indah ini.buat ilep lekas susul aku yaa,kejar pak john se sering mungkin.Pastikan hari2 mu di penuh jadwal bersama pak john n anak pak john nan ciek lai (^),buat me2y,selamatnya double deh,, selamat buat SS nya, n selamat buat sebentar lagi dirimu akan melepas masa lajang,hohoho..semoga langgeng ama aa' ya.. do'aku menyertaimu mey, beri aku keponakan yang banyak...hihihihi...

- Dewi n risha..kalian mengajarkan aku untuk selalu tegar menghadapi permasalahan yang ada.Kutipan sms dari dewi:

Ketika wajah ini penat memikirkan dunia,

Maka berwudhu'lah.

Ketika tangan ini letih menggapai cita-cita,

Maka bertakbirlah.

Ketika pundak tak kuasa memikul amanah,

Maka bersujudlah.

Ikhlasakan semuanya dan mendekatlah padaNYA.

Agar tunduk di saat yang lain angkuh.

Agar tegar disaat yang lain terlempar.

Hadapi dengan senyuman sista ☺

- Kawan2 ghellowku.. di absen yakk.. fani wong,alin ma'don,tek wid,idan srik,uwa hafizah n zorocin.. huhuhu (berharap mereka ga kan komplain dengan panggilan2 ini :D),

Fani, semangat yaaa cinn.. walau banyak terjadi hambatan di sana sini,tapi yakinlah bahwa kamu bisa n mampu melewatinya ^^..doaku slalu menyertaimu cinn. Oia cin,,stock film sedih mengharu birunya masih banyak kah???Kabar2i ya cin.. hahahaha..

Felin, ga nyangka y cin perkenalan kita saat ospek dulu mengantarkan qt ke dalam persahabatan ini..(flashback.com).Sesama Mahasiswi bimbingan pak Lukman, semangat ya cinto bikin skripsinya semoga semuanya di permudah y cin.. n segera meraih gelar SE secepatnya.hohoho..Oia Cin, kapan2 kita hunting jajanan di DPR lagi yaaaa.. Roti goreng n Es Buah Abang tak kan pernah terlupakan,,yihaaaa :D.. (perut karet.com)

Widya, makasi y buq. Masa2 itu sudah berhasil qt lewati. Pahit,senang,kekonyolan n surprise tak terduga sering terjadi dalam perjalanan qt menuju SE ini.

Idan n uwa,terimakasih atas kesediaan kalian menampungku di kost kalian. Kalian sukses memberi moment2 yang tak terlupakan dalam

hidupku..Moment2 tak terlupakan itu diantaranya: bikin pergedel kentang lope2,ketimpuk panci waktu mo pindahan kost,makan mie super peddaaas si mbak,main ka batang aia blakang kost ibu.. hohoho terimakasih atas moment2 yang indah itu ya cin. Sungguh benar2 tak terlupakan..^^
Zara, kamu jangan malas2 ketemu pak Udan ya...semoga skripsimu bisa kelar secepatnya..amin..

Terimakasih cintooo.. hari2 bersama kaliand selalu menjadi hari yang bahagia plus menyenangkan dalam hidupku.. tiada kata yang dapat menggambarkan kalian.. tetaplah menjadi sahabatku, Best Friend Forever ^^

11. Senior2 yang penulis hormati IE 04: bang beni yulison yang telah memberikan arahan n petunjuk pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.,uda2 uni2 IE 05.
12. Teman2 seperjuangan di IE 06 (genap maupun ganjil) yang namanya tidak bisa penulis jabarkan semua,IE 07 dan IE 08.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Padang, Agustus 2010
Penulis

Restya Oktarina

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI LITERATUR	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>the Vicious Circle of Poverty</i>)	9
2.1.2 Teori Perubahan Struktural	10
2.1.3 Teori SWOT	16
2.2 Studi Literatur	19
2.2.1 Konsep Kebijakan	19
2.2.2 Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah	21
2.2.3 Konsep Daerah Tertinggal	24
2.2.4 Penelitian Sebelumnya	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Data dan Sumber Data	28
3.2 Metode Menentukan Sektor Unggulan	28
3.3 Metode Analisis SWOT	30
BAB IV KONDISI DAERAH TERTINGGAL DI SUMATERA BARAT .	33
4.1 Kondisi Umum	33
4.1.1 Geografi	35
4.1.2 Penduduk dan Tenaga Kerja	36
4.1.3 Pengangguran dan Kemiskinan	38

4.2	Perekonomian	39
4.3	Pendidikan	45
4.4	Kesehatan.....	48
4.5	Infrastruktur	51
4.6	Faktor – faktor penyebab daerah tertinggal.....	54
4.6.1	Kondisi Geografis.....	54
4.6.2	Kondisi Sumber Daya Manusia.....	55
4.6.3	Kondisi Ekonomi dan Kemiskinan.....	55
4.6.4	Sarana dan Prasarana Yang Terbatas.....	56
4.6.5	Daerah rawan bencana dan konflik sosial.....	57
4.6.6	Efek Kebijakan Pembangunan yang tidak tepat.....	57
4.7	Permasalahan Daerah Tertinggal Di Sumatera Barat.....	58
4.7.1	Kabupaten Padang Pariaman.....	58
4.7.2	Kabupaten Solok.....	62
4.7.3	Kabupaten Solok Selatan	65
4.7.4	Kabupaten Dharmasraya	68
4.7.5	Kabupaten Pesisir Selatan	71
4.7.6	Kabupaten Pasaman.....	73
4.7.7	Kabupaten Pasaman Barat.....	76
4.7.8	Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	79
4.7.9	Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	82
BAB V	PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	85
5.1	Pembahasan	85
5.1.1	Visi dan Misi 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat	85
5.1.2	Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal di Sumatera Barat	92
5.1.3	Hasil Perhitungan Metode LQ (<i>Location Quetiont</i>)	100
5.1.4	Hasil Analisis SWOT.....	105
5.1.4.1	Bidang Perekonomian	107
5.1.4.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	108
5.1.4.3	Bidang Kelembagaan	109
5.1.4.4	Bidang Sarana dan Prasarana.....	110

5.2. Implikasi Kebijakan	111
5.2.1 Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal.....	111
5.2.2 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.....	111
5.2.3 Kebijakan Peningkatan Fungsi Kelembagaan.....	112
5.2.4 Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	112
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	113
6.2 Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks SWOT	18
Tabel 4.1	Kondisi Umum Kabupaten Tertinggal dan Kabupaten/Kota yang tidak tertinggal di Propinsi Sumatera BaratTahun 2008	34
Tabel 4.2	Pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal	41
Tabel 4.3	Jumlah sarana pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat tahun 2008.....	46
Tabel 4.4	Jumlah RSUD dan Tenaga Medis pada Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat.....	48
Tabel 4.4	Panjang Jalan dan Jembatan pada Kabupaten Tertinggal Di Sumatera Barat.....	51
Tabel 5.1	Hasil Perhitungan LQ Rata – rata tahun 2002 – 2008 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat.....	105
Tabel 5.2	Analisis SWOT Bidang Perekonomian	107
Tabel 5.3	Analisis SWOT Bidang Pemberdayaan Masyarakat	108
Tabel 5.4	Analisis SWOT Bidang Kelembagaan	109
Tabel 5.5	Analisis SWOT Bidang Sarana dan Prasarana.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>the Vicious Circle of Poverty</i>).....	9
Gambar 2.2. Model Lewis.....	13
Gambar 4.1 Luas Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat	35
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat	37
Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tertinggal Di Sumatera Barat.....	38
Gambar 4.4 Kontribusi masing-masing sektor usaha PDRB ADHB pada Propinsi Sumatera Barat	40
Gambar 4.5 Balita Gizi Buruk Pada Daerah Tertinggal di Sumatera Barat	49
Gambar 4.6 Jembatan Rusak Pada Daerah Tertinggal Di Sumatera Barat.....	52
Gambar 4.7 Perumahan Daerah Tertinggal di Sumatera Barat	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan dilaksanakan di setiap wilayah dengan mendasarkan pada rasa keadilan , namun masalah ketimpangan antar wilayah masih juga terjadi dan saat ini merupakan masalah yang cukup serius. Upaya pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal terus dilakukan dan telah dimulai beberapa tahun yang lalu namun hasilnya masih belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal tersebut (Bapeda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ,2006).

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk kementerian baru yaitu: Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu. Pembentukan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Kabinet Indonesia Bersatu merupakan salah satu wujud komitmen dan wujud nyata keseriusan Pemerintah Republik Indonesia untuk membangun daerah tertinggal demi tercapainya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dimana kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005. Tugas Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal adalah membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Yang dimaksud Daerah Tertinggal adalah suatu daerah kabupaten yang masyarakatnya serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Ketertinggalan daerah dimaksud dapat berupa keterisolasian akibat minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan pelayanan publik lainnya (Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,2007) .

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004 – 2009 dan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001 Tahun 2005, telah ditetapkan sebanyak 199 kabupaten diseluruh Indonesia yang tersebar di 32 propinsi masuk kriteria sebagai daerah tertinggal. Dimana 9 kabupaten yang termasuk kriteria sebagai daerah tertinggal tersebut terdapat di Propinsi Sumatera Barat, 9 Kabupaten tersebut yaitu:

1. Kabupaten Padang Pariaman
2. Kabupaten Solok
3. Kabupaten Solok Selatan
4. Kabupaten Dharmasraya
5. Kabupaten Pesisir Selatan
6. Kabupaten Pasaman
7. Kabupaten Pasaman Barat
8. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

9. Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Penetapan daerah tertinggal tersebut berdasarkan 6 kriteria dasar, yaitu:

1. Kondisi perekonomian masyarakat,
2. Kondisi sosial masyarakat,
3. Ketersediaan infrastruktur,
4. Kemampuan keuangan daerah,
5. Aksesibilitas terhadap pelayanan publik, dan
6. Kondisi geografis yaitu daerah terpencil dan rawan bencana.

Kondisi daerah tertinggal di Sumatera Barat secara geografis, umumnya relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan, baik transportasi maupun media komunikasi.

Masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah; keterbatasan infrastruktur dasar, seperti prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya, sehingga masyarakat di daerah tertinggal mengalami kesulitan melakukan aktivitas ekonomi dan sosial (Helmy,2010).

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang memiliki keterbatasan fisik, sosial dan ekonomi menjadi daerah yang maju. Kemajuan tersebut ditandai dengan adanya masyarakat yang berada di daerah tertinggal kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat yang berada di daerah yang tidak termasuk kriteria daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal memiliki cakupan berbeda dengan program penanggulangan kemiskinan yang juga digalakkan. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dan daerah maju (Bapeda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 2006).

Dengan demikian, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah pusat, propinsi dan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang lebih difokuskan pada pembangunan di daerah yang mempunyai kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kondisi tersebut, pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan, daerah pedalaman serta daerah rawan bencana seperti pada Kabupaten Kepulauan Mentawai di Propinsi Sumatera Barat. Disamping itu, perlu perhatian khusus pada daerah yang secara

ekonomi mempunyai potensi untuk maju namun mengalami ketertinggalan sebagai akibat kesalahan kebijakan pembangunan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas dijelaskan bahwa terdapat 9 Kabupaten Tertinggal di Propinsi Sumatera Barat. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk tertarik melakukan penelitian yang berjudul :

“ANALISIS KONDISI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI SUMATERA BARAT”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi, permasalahan dan kebijakan pada daerah tertinggal di Sumatera Barat dewasa ini?
2. Apa faktor – faktor yang menyebabkan ketertinggalan pada 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat?
3. Apa kebijakan yang diperlukan untuk membangun daerah tertinggal di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi, permasalahan dan kebijakan pada daerah tertinggal di Sumatera Barat dewasa ini.

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan ketertinggalan pada 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui kebijakan yang diperlukan untuk membangun daerah tertinggal di Sumatera Barat

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup penelitian dan pembahasan pada tulisan ini sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas yaitu bagaimana kondisi dan kebijakan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat dengan menggunakan Analisis SWOT untuk mengevaluasi (kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman) dari kebijakan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat yang telah dilaksanakan. Setelah dilakukan Analisis SWOT dari kebijakan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat yang telah dilaksanakan maka dapat ditentukan kebijakan pembangunan yang diperlukan untuk pembangunan daerah tertinggal yang akan dilaksanakan selanjutnya (Deddy,2006).

Selain itu juga digunakan metode penentuan sektor unggulan/sektor basis Location Quotient (LQ). Metode ini digunakan untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tepat dalam pengembangan perekonomian lokal. Yaitu sektor unggulan/sektor basis apakah yang harus dikonsentrasikan/dikembangkan oleh Kabupaten Tertinggal tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan dari skripsi ini:

BAB I Pendahuluan.

Berisikan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pendekatan Teori, Studi Literatur

Pada bab ini akan dijelaskan pendekatan teori, studi literatur yang penulis gunakan berhubungan dengan permasalahan untuk pemecahan masalah yang dibahas dan digunakan sebagai pedoman dan peralatan dalam analisis.

BAB III Metodologi penelitian

Pada bab ini metodologi penelitian yang penulis gunakan berhubungan dengan permasalahan untuk pemecahan masalah yang dibahas dan digunakan sebagai pedoman dan peralatan dalam analisis.

BAB IV Kondisi Daerah Tertinggal di Sumatera Barat.

Pada Bab ini dijelaskan bagaimana kondisi dan permasalahan pada 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat dan faktor – faktor yang menyebabkan ketertinggalan pada 9 kabupaten yang termasuk kriteria Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat.

BAB V Pembahasan dan Implikasi Kebijakan.

Bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian. Pada Bab ini akan dijelaskan kebijakan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat yang telah dilaksanakan. Kebijakan ini akan

dievaluasi dengan menggunakan Metode Analisis SWOT. Dengan menggunakan Metode Analisis SWOT ini dapat ditentukan apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari kebijakan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat yang telah dilaksanakan. Selanjutnya setelah dilakukan Analisis SWOT dari kebijakan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat yang telah dilaksanakan maka dapat ditentukan kebijakan yang diperlukan untuk pembangunan daerah tertinggal. Selain itu juga digunakan metode penentuan sektor unggulan/sektor basis *Location Quetiont* (LQ). Metode ini digunakan untuk menentukan implikasi kebijakan pembangunan dalam pengembangan perekonomian lokal, yaitu sektor unggulan/sektor basis apakah yang harus dikonsentrasikan/dikembangkan oleh pemerintah daerah tersebut.

BAB VI Penutup

Berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari penulis berhubungan dengan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

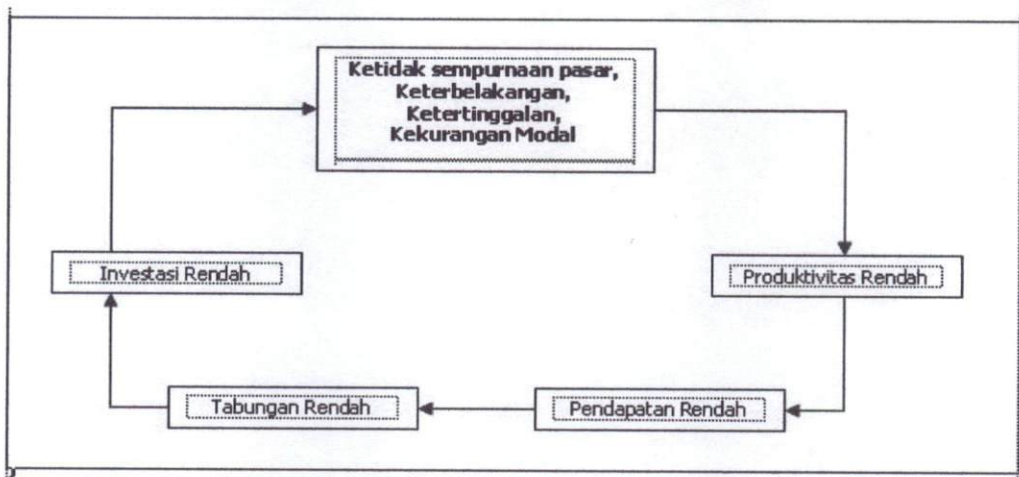
LANDASAN TEORI DAN STUDI LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, tahun 1953. Ia mengatakan "Negara miskin itu miskin karena dia miskin" (a poor country is poor because it is poor). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya (Mudrajad Kuncoro, 2000). Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1. Lingkaran Setan Kemiskinan (the Vicious Circle of Poverty)



Sumber : Ragnar Nurkse, 1953 (Seperti dikutip oleh Mudrajad Kuncoro tahun 2000)

Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri – ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecendrungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar . Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang memprogramkan pengentasan kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

2.1.2 Teori Perubahan Struktural

Teori Perubahan Struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme perubahan ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang modern. Pembangunan ekonomi suatu negara sering disertai oleh perubahan struktur perekonomiannya dari agraris ke industry (Adrimas,1993). Teori yang menggunakan pendekatan perubahan struktural dikemukakan oleh W. Arthur Lewis (1954) dengan teori migrasinya.

Teori yang menggunakan pendekatan perubahan struktural dikemukakan oleh W. Arthur Lewis (1954) dengan teori migrasinya modern yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada (Mudrajad Kuncoro,2000).

Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara terbagi dua yaitu:

1. Perekonomian Tradisional

Dalam teorinya Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan merupakan perekonomian tradisional mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan asumsi perekonomian tradisional yang tingkat hidup masyarakatnya berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (marginal product) dari tenaga kerja yang bernilai nol, artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya "The law of diminishing marginal return". Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variable, dalam hal ini tenaga kerja, justru akan menurunkan total produksi yang ada. Di sisi lain, pengurangan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor pertanian tidak akan mengurangi tingkat produksi yang ada. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerja terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak pada kawasan perkotaan, dimana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menyiratkan bahwa nilai produk marginal

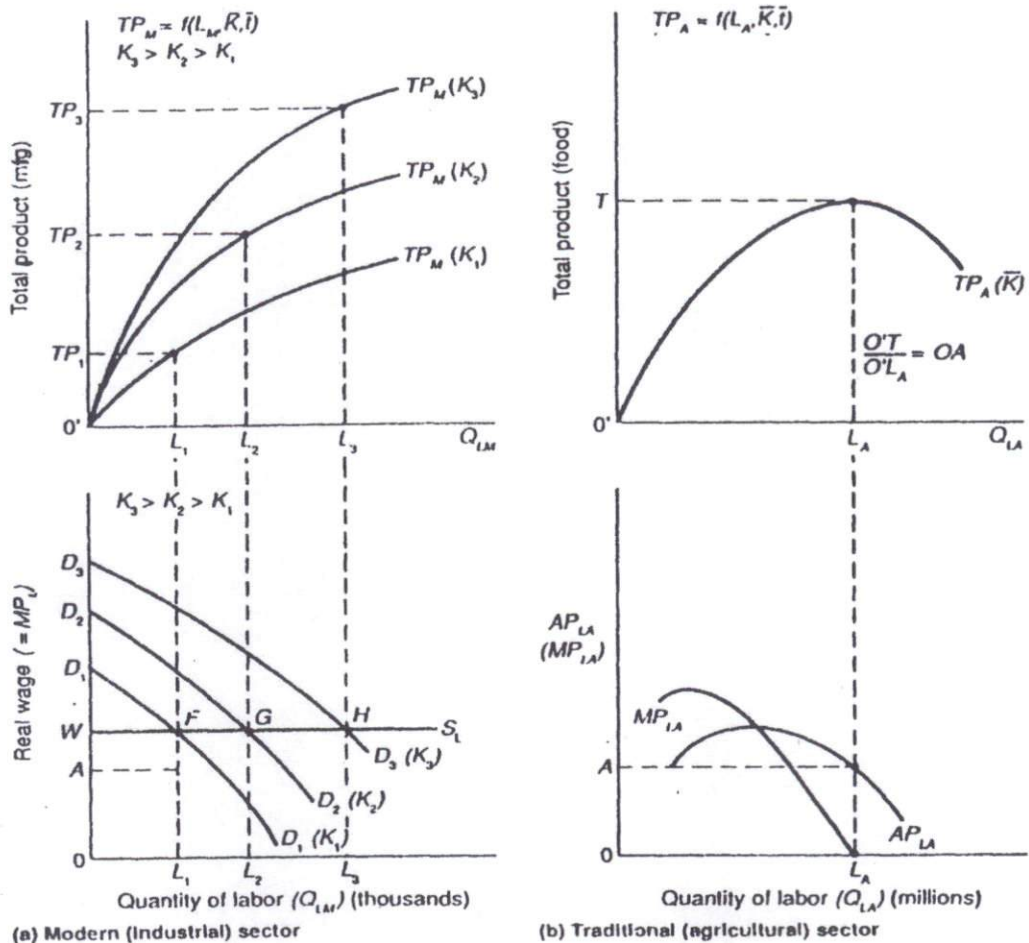
terutama dari tenaga kerja, bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari perdesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang bernilai positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi. Dengan demikian industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan dan ini akan berusaha dipenuhi oleh penduduk perdesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota tiga puluh persen lebih tinggi dari pada tingkat upah di perdesaan, yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga bentuk kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan melengkapi daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern tersebut. Percepatan ekspansi output sangat ditentukan oleh tingkat investasi di sektor industri dan akumulasi modal yang terjadi di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan (profit) pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut.

Model pertumbuhan dua sektor Lewis dapat dilihat pada Gambar 2.2. Pada gambar dibawah ini dapat lihat bahwa Gambar 2.2.a

menunjukkan sistem perekonomian kota modern dan Gambar 2.2.b menunjukkan sistem perekonomian pertanian yang tradisional. Untuk lebih jelasnya gambar Model Lewis dapat kita lihat pada Gambar 2.2 berikut :

Gambar 2.2. Model Lewis



Sumber : W. Arthur Lewis, 1954 (Seperti dikutip oleh Mudrajad Kuncoro Tahun 2000)

Lewis menggunakan dua asumsi utama untuk menjelaskan perekonomian tradisional. Pertama, karena terjadi surplus tenaga kerja,

maka nilai produk marginal dari tenaga kerja (M_{pla}) bernilai nol. Kedua, semua tenaga kerja di perdesaan memiliki sumbangan yang sama terhadap output yang dihasilkan, sehingga upah tidak didasarkan pada produk marginal tetapi lebih pada produk rata – rata dari tenaga kerja tersebut. Diasumsikan bahwa sejumlah O_La ($=O'La$) pekerja di sektor pertanian memproduksi sebanyak $O'T$ bahan makanan, yang sama artinya dengan pembagian secara proporsional terhadap semua orang sebanyak OA per orang. Hal ini menunjukkan bahwa OA adalah tingkat average product yang ekuivalen dengan pembagian antara $O'T/O'La$. Nilai marginal product pekerja O_La bernilai nol. Seperti ditunjukkan pada Gambar Model Lewis diatas.

Gambar 2.2.a menunjukkan kurva tingkat produk dari sektor modern. Output dari komoditas manufaktur (T_{pm}) di sektor modern merupakan fungsi dari input tenaga kerja yang bersifat variabel (L_m), pada tingkat kapital (K) dan teknologi (t) yang tetap. Jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan total produk sebesar $O'TP1$ pada saat kapital mencapai $K1$ adalah sebesar $O'L1$. Sesuai dengan Teori Lewis, tingkat akumulasi kapital akan terus meningkat dari $K1$ ke $K2$ dan seterusnya, karena berlakunya asumsi bahwa pengusaha akan menginvestasikan kembali keuntungannya ke industri tersebut.

Hal ini akan menyebabkan total produk akan meningkat dari $TP1$ ke $TP2$ dan seterusnya. Dengan kurva total produk yang ada akan dapat diturunkan kurva produk marginal. Dalam pasar tenaga kerja yang bersifat

persaingan sempurna di sektor modern maka kurva produk marginal akan menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja.

Segmentasi sebesar OA pada Gambar 2.2.a dan Gambar 2.2.b bagian bawah, menunjukkan tingkat subsistensi pendapatan di sektor pertanian yang tradisional. Segmentasi sebesar OW menunjukkan tingkat upah riil yang terjadi di sektor perkotaan. Dengan konfigurasi upah seperti itu, penawaran tenaga kerja di sektor perdesaan diasumsikan memiliki elastisitas yang sempurna, atau dengan kata lain penawaran tenaga kerja adalah tidak terbatas. Tingkat upah sektor perkotaan yang lebih tinggi upah riil di perdesaan, akan menyebabkan perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota tanpa adanya risiko peningkatan tingkat upah itu sendiri.

Tingkat keuntungan maksimal pengusaha di perkotaan akan terjadi pada saat marginal physical product (produk fisik marginal) sama dengan upah buruh. Titik F,G,H, pada Gambar 2.2.a sebelah bawah menunjukkan tingkat keseimbangan tenaga kerja, yaitu pertemuan kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pada saat total produk sebesar O'TP1 (K1), kurva permintaan tenaga kerja dicerminkan oleh kurva D1. Pada saat itu jumlah tenaga kerja yang dapat diserap adalah OL1. Daerah segi empat OWFL1 adalah pengeluaran untuk upah total yang dikeluarkan oleh pengusaha. Yang berarti total penerimaan dari semua tenaga kerja yang bekerja di sektor modern, pada tingkat upah OW. Segitiga WD1F merupakan total keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha, jika asumsi dasar bahwa keuntungan yang diperoleh pengusaha akan diinvestasikan kembali, maka modal yang digunakan pada proses produksi meningkat menjadi K2. Itu

berarti bahwa tingkat produksi total adalah O'TP2, dengan mempekerjakan pekerja sebanyak OL2 yang berarti mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja dari D1 ke D2. Konsekuensinya jumlah yang dapat diserap oleh sektor modern akan meningkat, meski pada tingkat upah yang tetap. Di sisi lain pengusaha mengalami peningkatan keuntungan yang nantinya akan diinvestasikan lagi di sektor tersebut. Proses pertumbuhan sektor modern diatas dan mengalirnya arus tenaga kerja yang berurbanisasi diasumsikan akan terus berlanjut sampai surplus tenaga kerja yang terjadi di perdesaan terserap sepenuhnya di sektor modern.

2.1.3 Teori SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dari kebijakan yang telah dilaksanakan pada daerah tertinggal di Sumatera Barat. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities) namun bersamaan meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats) pada daerah tertinggal di Sumatera Barat. Selanjutnya, ditentukanlah kebijakan pembangunan selanjutnya.

Berdasarkan elemen di atas maka dapat diidentifikasi berbagai isu strategis dan dirumuskan bidang-bidang strategis yang dianggap penting untuk dikembangkan.

1. Analisis Lingkungan Internal/Internal Faktor Analisis SWOT (IFAS)

Pemikiran terhadap lingkungan internal bertujuan untuk menilai lingkungan internal organisasi dalam mengidentifikasi kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki dan aspek – aspek yang membantu atau merintangi pencapaian misi organisasi dan pemenuhan tujuannya.

2. Analisis Lingkungan Eksternal/Eksternal Faktor Analisis SWOT (EFAS)

Penilaian terhadap lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui lingkungan di luar organisasi dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pemanfaatan potensi yang ada.

Berdasarkan elemen-elemen dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal di atas maka dapat disusun strategi pembangunan daerah yang digambarkan oleh matriks SWOT. Berikut adalah Tabel 2.1 yang menjelaskan bagaimana menentukan strategi dari analisis SWOT.

Tabel 2.1
Matriks SWOT

EFAS IFAS	STRENGTHS (S) Tentukan faktor-faktor kekuatan internal	WEAKNESS (W) Tentukan faktor-faktor kelemahan internal
	OPPORTUNITIES (O) Tentukan faktor-faktor peluang eksternal	THREATS (T) Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal
	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimal kelemahan dan memanfaatkan peluang
	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Freddy Rangkuti (1997)

1. Strategi SO, juga disebut sebagai strategi agresif dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut peluang yang sebesar-besarnya.
2. Strategi ST, juga disebut sebagai strategi diversifikasi tindakan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO, juga disebut sebagai strategi rasionalisasi ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi ST, juga disebut strategi defensif yang berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

2.2 Studi Literatur

2.2.1 Konsep Kebijakan

Pengertian Kebijakan :

1. Kebijakan adalah jalan atau cara bagi lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan publik (dalam hal ini pemerintah) untuk mengatasi suatu permasalahan atau sekelompok permasalahan yang saling berhubungan (Pal, 1992).
2. Kebijakan adalah cara atau jalan yang dipilih pemerintah untuk mendukung suatu aspek dari ekonomi termasuk sasaran yang pemerintah cari untuk mencapainya dan pemilihan metoda untuk mencapai tujuan dan sasaran itu (Elis, 1994).
3. Kebijakan adalah tindakan apapun yang dipilih pemerintah perlu untuk dilakukan (Dya, 1984).

4. Kebijakan adalah kegiatan yang dipilih secara sengaja oleh aktor tertentu atau sekelompok aktor dalam mengatasi suatu masalah. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dan pejabatnya (Anderson, 1984).
5. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan (Dodik, 2006).

Dari berbagai definisi kebijakan baik yang sederhana maupun yang kompleks di atas, Kebijakan dapat diartikan sebagai cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan maupun implementasinya di lapangan dengan menggunakan instrumen tertentu.

Unsur – Unsur Kebijakan.

Kebijakan merupakan refleksi dari struktur dan fungsi pemerintahan yang mengaturnya. Peraturan, perundang-undangan dan ketetapan berisi pembatasan-pembatasan, hak dan kewajiban serta pengaturan lainnya yang mengikat. Setiap peraturan dijalankan oleh suatu struktur pemerintahan yang berbeda-beda dan sangat tergantung akan budaya kebijakannya (Tony Jogo, dkk, 2003).

Kebijakan adalah kendaraan pemerintah untuk berbuat yang baik bagi rakyatnya. Karena itu kebijakan adalah untuk kepentingan umum (publik). Kebijakan dapat dinyatakan dalam berbagai 1) instrumen legal (hukum) seperti peraturan perundangan atau 2) instrumen ekonomi seperti kebijakan fiskal, pajak, subsidi, harga, kebijakan keuangan, moneter dan

finansial; atau 3) petunjuk dan arahan atau instruksi dan perintah; 4) pernyataan politik semata (*political statement*); dan 5) kebijakan dapat dituangkan dalam garis-garis besar arah pembangunan, strategi, rencana, program dan kemudian dapat diterjemahkan ke dalam proyek dan rencana anggaran tertentu.

Dari berbagai definisi di atas, beberapa elemen penting dari kebijakan yaitu:

1. Masalah yang akan diatasi dengan kebijakan
2. Cara untuk mengatasi masalah tersebut
3. Tujuan yang akan dicapai
4. Kepentingan yang diinginkan
5. Aktor yang akan melakukannya
6. Instrumen atau perangkat untuk melaksanakan kebijakan
7. Aturan untuk menggunakan instrumen tersebut

Fungsi Kebijakan

Fungsi kebijakan menurut Dodik Ridho Nurrochman adalah :

- a. Sebagai perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi – strategi pembangunan.
- b. Memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

2.2.2 Kebijakan Pembangunan Daerah

Menurut Fashbir Noor Siddin, Pembangunan ekonomi adalah sebuah upaya yang terencana dan teratur dalam mengelola segenap

sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah berlandaskan pada kebijakan pengembangan wilayah sebagai kesatuan geografis beserta unsur – unsur yang terkait kepadanya yaitu aspek administratif dan fungsional.(Fashbir,2001)

Menurut Robinson Tarigan (2005), Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi faktor – faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh seberapa besar terjadi transfer – payment, dana dari luar wilayah.

Menurut Boediono (1983), Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Jadi persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Pertumbuhan itu haruslah bersumber dari proses intern perekonomian tersebut.

Menurut Lincoln Arsyad (1999), Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk

menciptakan suatu lapangan kerja yang baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Menurut Suroso (1997), Pembangunan daerah merupakan suatu upaya untuk lebih meningkatkan atau memberi arti yang lebih penting agar suatu wilayah dalam menopang kegiatan ekonomi sangat berperan penting. Pembangunan wilayah dengan dengan tiga tahap strategi sebagai suatu proses yang diperuntukkan untuk bagian – bagian khusus di suatu negara. Konsekuensi dipergunakannya pendekatan wilayah dalam perencanaan daerah serta mewujudkan azas dekonsentrasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut M.L. Jhingan (2000), Pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan daerah guna menserasikan laju perkembangan antar daerah, antar kota, antar desa serta mempercepat pertumbuhan sesuai potensi dan karakteristik daerah yang bersangkutan. Pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kapasitas masyarakat, memperluas kesempatan usaha maupun kesempatan kerja dalam rangka mewujudkan kemandirian perekonomian nasional.

Persyaratan dasar pembangunan ekonomi salah satunya adalah perubahan struktural yang mengandung arti peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern. Perekonomian negara terbelakang seperti biasanya ditandai oleh luasnya sektor primer, dan sempitnya sektor sekunder serta tersier. Perubahan struktural dapat bermula

dengan peralihan penduduk dari sektor primer ke sektor sekunder dan kemudian ke sektor tersier.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi adalah(Jhinghan,2000):

1. Mencapai kenaikan yang cepat dari pendapatan perkapita.
2. Menyediakan kesempatan kerja yang cukup.
3. Mengusahakan pembagian pendapatan yang merata.
4. Mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan kemakmuran antar satu dengan yang lainnya.
5. Merubah struktur perekonomian supaya tidak berat sebelah.

2.2.3 Konsep Daerah Tertinggal.

Daerah Tertinggal adalah Suatu daerah kabupaten yang masyarakatnya serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,2007).

Daerah tertinggal dapat meliputi dan melewati batas administratif daerah (desa atau kecamatan) sesuai dengan keberadaan dan aktivitas komunitas yang berada didaerah tersebut. Selanjutnya ciri-ciri daerah tertinggal tertinggal adalah sebagai berikut(Bappeda Propinsi Sumatera Barat) :

- a. Daya dukung sumberdaya alam sangat rendah, kesuburan tanahnya yang rendah, rawan longsor, rawan banjir, terbatasnya sumber air, daerah dengan topografi yang terjal, atau tanah berawa-awa/gambut.

- b. Sumberdaya alamnya dapat mempunyai potensi yang besar, namun daerah tersebut belum berkembang karena tidak tersedia akses dari daerah tersebut ke pusat-pusat pertumbuhan di sekitarnya.
- c. Aktivitas ekonomi dan sosial sulit dilakukan karena keterbatasan prasarana dan sarana daerah.
- d. Kualitas dan jumlah rumah penduduk terpencar dan pada daerah dengan topografi berat menyebabkan daerah tersebut sulit dijangkau.
- e. Dihuni oleh masyarakat yang terisolir secara budaya, yaitu Komunitas Adat Terpencil.

Penetapan kriteria daerah tertinggal yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dengan menggunakan sumber data : Potensi Desa Tahun 2003, Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2002, Keuangan Daerah Tahun 2003 dengan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam kriteria dasar, yaitu (Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, 2007) :

1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia, sarana dan prasarana
3. Kemampuan keuangan lokal
4. Aksesibilitas terhadap pelayanan publik
5. Karakteristik daerah/kondisi geografis (terpencil, rawan bencana)

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh

tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal ini berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan (bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju). Di samping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Diperlukan program pembangunan daerah tertinggal yang lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal dibanding dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan antarnegara, daerah pulau-pulau kecil, daerah pedalaman, serta daerah rawan bencana. Di samping itu, perlu perhatian khusus pada daerah yang secara ekonomi mempunyai potensi untuk maju namun mengalami ketertinggalan sebagai akibat terjadinya konflik sosial maupun politik.

2.2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai daerah tertinggal diteliti oleh Edi Basuno pada tahun 2007. Ia meneliti bagaimana pemberdayaan masyarakat pertanian daerah tertinggal di Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitiannya adalah terbentuknya kelompok yang kuat menjadi persyaratan masyarakat untuk mampu menolong diri mereka sendiri pada daerah tertinggal di

Kabupaten Sukabumi. Indikasi kelompok kuat antara lain mampu mengumpulkan modal secara mandiri dari berbagai kegiatan yang dilakukan. Dan disini juga diperlukan pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal melalui peran lembaga keuangan seperti Bank Pembangunan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi dan Lembaga Keuangan Lainnya. Disamping itu dari penelitiannya ia juga menyarankan agar prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi lebih diarahkan pada daerah tertinggal agar terciptanya pemerataan pembangunan dalam segala bidang (Edi Basuno,2001).

Selanjutnya Merry Theresia meneliti tentang pengembangan sektor pariwisata terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2006. Hasil penelitiannya adalah diperoleh hasil perhitungan LQ untuk Subsektor restoran dari tahun 2000 – 2004 besar dari 1 ($LQ > 1$) artinya berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga dapat dijadikan sebagai sektor basis bagi pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan dan pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Implikasi Kebijakan dari penelitian untuk mendukung perkembangan Subsektor restoran untuk tahun selanjutnya adalah perbaikan sarana rumah makan. Peningkatan promosi atau pemasaran pariwisata, memfasilitasi tenaga kerja yang bekerja pada Subsektor restoran, mendukung kegiatan para investor dalam mengelola dan mengembangkan rumah makan dan restoran dengan memberikan kemudahan prosedur(Merry Theresia,2006).

Selain itu, Daisy Catrina meneliti tentang kredit sebagai sarana peningkatan produksi bagi petani karet di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tahun 1990. Dari hasil estimasi yang dilakukannya bahwa perubahan tingkat produksi (Y) ditentukan oleh perubahan variabel bebasnya, hal ini dapat dilihat dari nilai R^2 yang didapatkan yaitu sebesar 0,760, artinya yaitu sekitar 76 persen (%) perubahan tingkat produksi karet di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dipengaruhi oleh perubahan variabel bebasnya. Variabel bebas yang digunakannya adalah modal tetap, modal kerja, upah buruh, kredit dan luas areal yang digunakan(Daisy Catrina,1990)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan juga dari United Nation Development Program (UNDP). Selain itu juga digunakan data dari BPS dan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 9 Kabupaten Tertinggal.

3.2 Metode Menentukan Sektor Unggulan

Metode ini digunakan untuk menentukan kebijakan pembangunan dalam pengembangan perekonomian lokal, yaitu sektor unggulan/sektor basis apakah yang harus dikonsentrasikan/dikembangkan oleh Kabupaten Tertinggal tersebut.

Metode Location Quotient (LQ) yaitu usaha mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan perannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan antar industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional, dengan formulasi sebagai berikut(Arsyad, 1999):

$$LQ_{ij} = \frac{Y_{ij} / \sum_{i=1}^n Y_{ij}}{\sum_{j=1}^m Y_{ij} / \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m Y_{ij}}$$

LQ = Location Quetiont/ koefisien lokasi

Y_{ij} = Nilai tambah dari sektor i di satu wilayah (sub wilayah/kabupaten)

$\sum_{j=1}^m Y_{ij}$ = Nilai tambah sektor i secara regional (propinsi)

$\sum_{i=1}^n Y_{ij}$ = Total Output (PDRB) seluruh sektor di satu wilayah
(subwilayah/kabupaten)

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m Y_{ij}$ = Total Output (PDRB) seluruh sektor secara regional (propinsi)

i = 1,2,3,...n (sektor)

j = 1,2,3,...m (sektor)

Jika:

$LQ > 1$ artinya sektor i merupakan sektor unggulan/basis

$LQ < 1$ artinya sektor i merupakan sektor non basis.

Asumsi dari metode ini adalah semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat daerah (pola pengeluaran secara geografis sama), Tingkat konsumsi rata-rata

untuk masing-masing barang adalah sama. Kemampuan untuk produksi dan juga produktifitas buruh atau tenaga kerja adalah sama di setiap daerah.

3.2 Metode Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dari kebijakan yang telah dilaksanakan pada daerah tertinggal di Sumatera Barat. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities) namun bersamaan meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats) pada daerah tertinggal di Sumatera Barat. Selanjutnya, ditentukanlah kebijakan pembangunan selanjutnya.

Berdasarkan elemen di atas maka dapat diidentifikasi berbagai isu strategis dan dirumuskan bidang-bidang strategis yang dianggap penting untuk dikembangkan.

1. Analisis Lingkungan Internal/Internal Faktor Analisis SWOT (IFAS)

Pemikiran terhadap lingkungan internal bertujuan untuk menilai lingkungan internal organisasi dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan aspek – aspek yang membantu atau merintangi pencapaian misi organisasi dan pemenuhan tujuannya.

2. Analisis Lingkungan Eksternal/Eksternal Faktor Analisis SWOT (EFAS)

Penilaian terhadap lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui lingkungan di luar organisasi dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pemanfaatan potensi yang ada.

Berdasarkan elemen-elemen dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal di atas maka dapat disusun strategi pembangunan daerah yang digambarkan oleh matriks SWOT. Berikut adalah Tabel 2.1 yang menjelaskan bagaimana menentukan strategi dari analisis SWOT .

Tabel 2.1

Matriks SWOT

<div> <div>IFAS</div> <div>EFAS</div> </div>	<div>STRENGTHS (S)</div> <div>Tentukan faktor-faktor kekuatan internal</div>	<div>WEAKNESS (W)</div> <div>Tentukan faktor-faktor kelemahan internal</div>
	<div>OPPORTUNITIES (O)</div> <div>Tentukan faktor-faktor peluang eksternal</div>	<div>STRATEGI WO</div> <div>Ciptakan strategi yang meminimal kelemahan dan memanfaatkan peluang</div>
<div>THREATS (T)</div> <div>Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal</div>	<div>STRATEGI ST</div> <div>Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</div>	<div>STRATEGI WT</div> <div>Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</div>

Sumber: Freddy Rangkuti (1997)

1. Strategi SO, juga disebut sebagai strategi agresif dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut peluang yang sebesar-besarnya.
2. Strategi ST, juga disebut sebagai strategi diversifikasi tindakan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO, juga disebut sebagai strategi rasionalisasi ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi ST, juga disebut strategi defensif yang berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman

BAB IV

KONDISI DAERAH TERTINGGAL DI SUMATERA BARAT

4.1 Kondisi Umum

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana kondisi pada daerah tertinggal/ 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat, analisis yang dilakukan yaitu mengenai geografi, penduduk dan tenaga kerja dan juga mengenai kemiskinan dan pengangguran. Dalam analisis atau pembahasannya kondisi daerah tertinggal akan dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya yang lebih maju di Sumatera Barat.

Pembahasan mengenai geografi difokuskan pada bagaimana luas 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat, kemudian dibahas kabupaten mana yang terluas dari 9 Kabupaten tersebut dan Kabupaten mana yang paling kecil diantara 9 Kabupaten Tertinggal tersebut. Selain itu juga dilakukan perbandingan dengan kondisi geografi daerah lainnya yang lebih maju di Sumatera Barat.

Berikutnya pembahasan mengenai penduduk dan tenaga kerja akan dijelaskan berapa jumlah penduduk dan tenaga kerja pada 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat. Selanjutnya juga dijelaskan bagaimana kepadatan penduduknya yaitu perbandingan dari luas daerah dengan jumlah penduduk, pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui apakah daerah tertinggal tersebut penduduknya masih jarang.

Selain itu juga dibahas bagaimana kemiskinan dan pengangguran pada daerah tertinggal, dimana kemiskinan erat kaitannya dengan daerah tertinggal.

Pada pembahasan mengenai kemiskinan dan pengangguran ini juga akan dibahas berapa persentase jumlah penduduk miskin dari keseluruhan jumlah penduduk pada Kabupaten Tertinggal tersebut. Untuk itu digunakanlah tabel induk yang merangkum kondisi umum yang dijelaskan diatas, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Kondisi Umum
Kabupaten Tertinggal dan Kabupaten/Kota yang tidak tertinggal
di Propinsi Sumatera Barat
Tahun 2008

No	Kota/Kabupaten	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Jumlah Angk. Kerja	Jumlah Pengang- Guran	Jumlah Penduduk Miskin (org)
<u>Kab. Tertinggal</u>							
1.	Padang Pariaman	1.328,79	387.195	291	165.684	11.435	51.708
2.	Solok	3.738,00	355.705	95	166.784	12.742	58.971
3.	Solok Selatan	3.346,20	132.093	39	57.192	4.374	38.807
4.	Dharmasraya	2.961,13	180.915	61	80.911	5.360	13.661
5.	Pesisir Selatan	5.794,95	442.257	76	176.690	15.761	68.741
6.	Pasaman	4.447,63	257.374	58	119.834	8.567	40.127
7.	Pasaman Barat	3.387,77	333.192	98	151.260	8.138	42.150
8.	Swl/Sijunjung	3.130,80	202.275	65	89.251	6.001	37.654
9.	Kep. Mentawai	6.011,35	68.097	11	28.376	2.546	17.794
<u>Kab/Kota Tidak Tertinggal</u>							
1.	Tanah Datar	1.336,00	335.926	251	168.655	8.822	25.639
2.	Agam	2.232,30	429.822	193	203.799	11.435	59.984
3.	50 Kota	3.354,30	331.771	99	168.030	9.555	42.791
4.	Padang	694,96	856.815	1.233	344.497	50.343	43.070
5.	Solok	57,64	58.473	1.014	27.200	2.608	3.890
6.	Sawahlunto	273,45	54.307	199	20.543	1.353	3.364
7.	Padang Panjang	23,00	54.218	2.357	25.108	1.834	1.803
8.	Bukittinggi	25,24	106.045	4.202	52.631	3.845	4.176
9.	Payakumbuh	80,43	105.994	1.318	50.492	3.483	8.030
10.	Pariaman	73,36	70.625	963	30.575	2.970	7.695
Sumatera Barat		42.297,30	4.763.099	113	2.127.512	171.134	550.249

Sumber : Bappeda dan BPS Propinsi Sumatera Barat

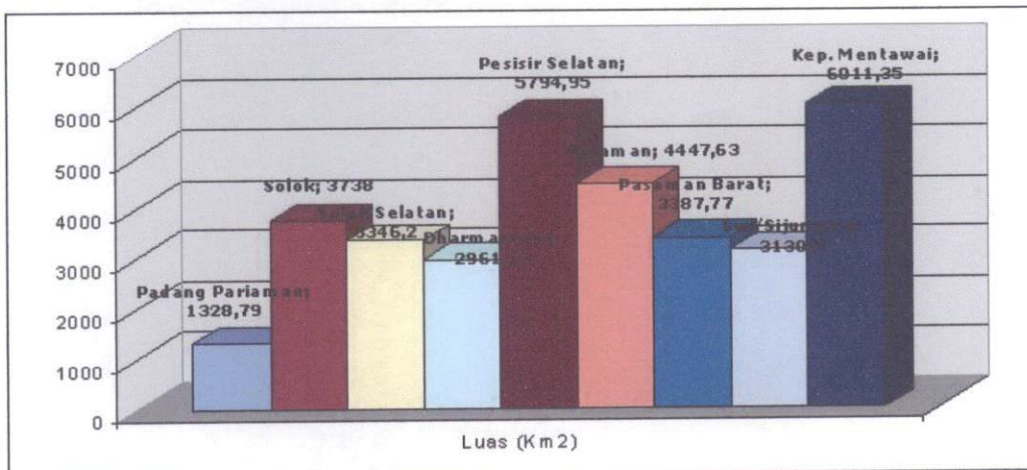
4.1.1 Geografi

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki wilayah terluas yaitu 6.011,35 Km² (14,21 persen dari luas Sumatera Barat) diantara 9 Kabupaten yang termasuk kriteria tertinggal di Sumatera Barat dan juga diantara beberapa Kabupaten/Kota lainnya yang tidak termasuk kriteria tertinggal.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 4 pulau besar yang didiami penduduk, yaitu Pulau Siberut di bagian utara sebagai pulau terbesar, Pulau Sipora di bagian tengah, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan di bagian selatan. Kabupaten Kepulauan Mentawai, secara geografis merupakan gugusan pulau-pulau besar dan kecil. Selain pulau-pulau besar (Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan), juga terdapat 252 pulau-pulau kecil. Untuk lebih jelasnya perbandingan luas 9 Kabupaten Tertinggal dapat dilihat dalam pada Gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1

Luas Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat tahun 2008



Sumber : BPN Propinsi Sumatera Barat

Dari Gambar 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki luas terkecil diantara 9 Kabupaten tertinggal. Dengan luas 1328,79 Km². Sampai akhir tahun 2008, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 46 Nagari, 366 Jorong. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kayutanam tercatat memiliki wilayah paling luas yakni 228,70 Km² sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas terkecil yakni 25,56 Km².

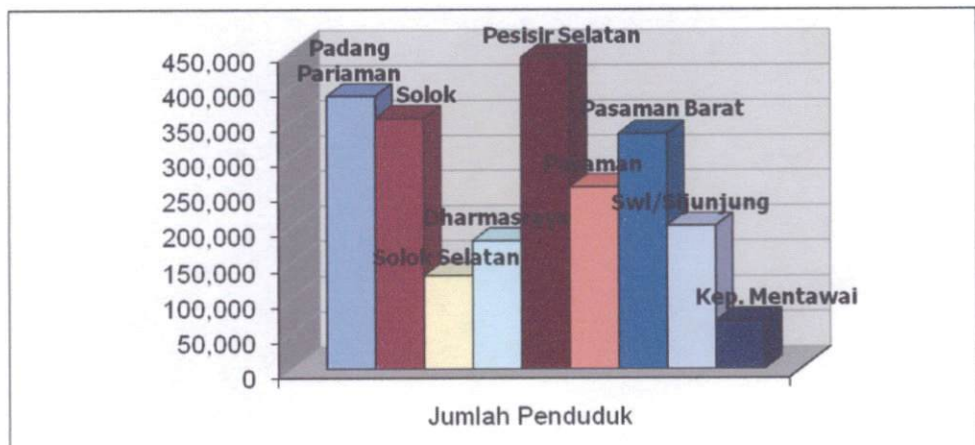
4.1.2 Penduduk dan Tenaga Kerja

Berdasarkan data BPS tahun 2008 pada Tabel 4.1 diatas, Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki penduduk yang paling banyak diantara 9 Kabupaten Tertinggal lainnya, yaitu 422.257 jiwa. Jika dibandingkan dengan daerah yang maju lainnya di Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan berada pada urutan kedua setelah Kota Padang. Dan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 68.109 jiwa.

Jika dilihat dari segi kepadatan penduduk pada 9 kabupaten tertinggal rata-rata penduduknya masih jarang, coba kita lihat contohnya Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana kepadatan penduduknya 11 orang per kilometer padahal dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas di Sumatera Barat. Dibandingkan dengan daerah maju lainnya seperti Kota Padang dimana kepadatan penduduknya sebanyak 1.233 orang per-kilometer. Dalam Tabel 4.1 diatas, rata – rata kepadatan penduduk pada 9 Kabupaten Tertinggal masih jarang, yaitu rata – rata masih dibawah 100 orang per kilometer, hanya satu daerah yang berada diatas 100 orang per kilometer yaitu Kabupaten Padang Pariaman dengan kepadatan penduduknya sebesar 291 orang

perkilometer. Untuk lebih jelasnya bagaimana perbandingan penduduk pada 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat tahun 2008



Sumber: BPS Propinsi Sumatera Barat

Dari gambar 4.2 diatas dapat kita lihat perbandingan jumlah penduduk 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki penduduk terbanyak dan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki penduduk paling sedikit seperti yang telah dijelaskan diatas.

Sama halnya dengan jumlah tenaga kerja, berdasarkan data BPS tahun 2008 pada Tabel 4.1 diatas Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki tenaga kerja yang paling banyak diantara 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat. Dengan jumlah angkatan kerja 176.690 jiwa atau 40 persen dari jumlah penduduk. Dan Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memiliki tenaga kerja yang paling sedikit yaitu: 28.376 atau 41,6 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

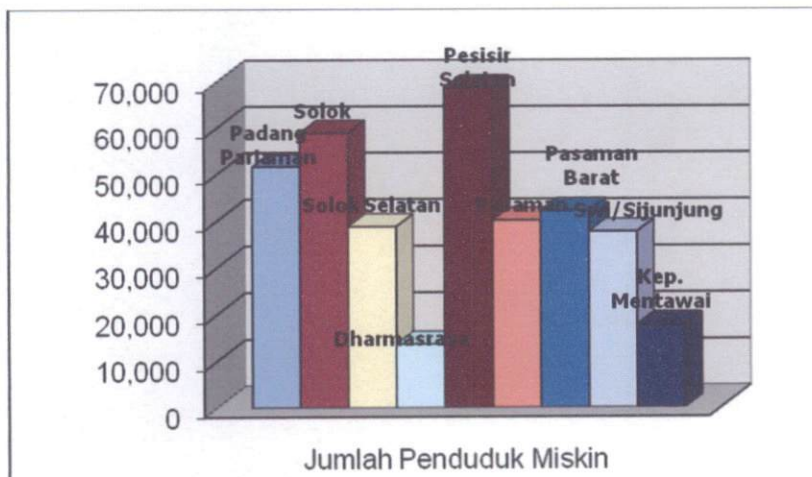
4.1.3 Pengangguran dan Kemiskinan

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 untuk jumlah pengangguran, Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki angka pengangguran terbanyak diantara 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat yaitu 15.761 orang. untuk lebih jelasnya

Selanjutnya pembahasan mengenai jumlah kemiskinan pada 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat. Daerah tertinggal erat kaitannya dengan jumlah kemiskinan. Menurut Tri Panadji meluasnya gejala kemiskinan dan ketidakmerataan bukan hanya mengindikasikan belum sehatnya kehidupan sosial, tetapi juga sekaligus menunjukkan bahwa proses pembangunan nasional yang berwawasan kemanusiaan belum sepenuhnya mencapai hasil yang bisa dibanggakan. Untuk lebih jelasnya bagaimana jumlah kemiskinan pada 9 Kabupaten Tertinggal dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat tahun 2008



Sumber: Bappeda Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data BPS tahun 2008 pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.3 diatas dapat kita lihat bahwa untuk jumlah kemiskinan tertinggi masih berada pada Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana jumlah kemiskinannya adalah sebanyak 68.741 jiwa atau 16 persen dari jumlah penduduk pada Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dilihat secara keseluruhan jumlah kemiskinan pada 9 Kabupaten Tertinggal tersebut rata – rata masih berada diatas 10 persen dari jumlah penduduk pada 9 kabupaten tersebut. Angka tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju di Sumatera Barat seperti Kabupaten Tanah Datar dengan angka kemiskinan 7,6 persen dari jumlah penduduknya atau sebanyak 25.639 orang.

4.2 Perekonomian

Pada bagian ini, akan dijelaskan bagaimana perekonomian pada Propinsi Sumatera Barat dan bagaimana perekonomian pada 9 Kabupaten Tertinggal yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan pendapatan per kapita masing – masing daerah. Dalam pembahasannya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita pada daerah tertinggal akan dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumatera Barat yang lebih maju. Dari pendapatan per kapita akan dapat diketahui apakah daerah tersebut jauh tertinggal dari daerah yang lebih maju di Sumatera Barat. Selain itu juga akan dianalisis pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonominya pada daerah tertinggal. Dan yang terakhir juga akan dibandingkan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi.

Selama tahun 2008 tercatat pertumbuhan Sumatera Barat mampu tumbuh mencapai 6,37 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai pada tahun yang lalu hanya sebesar 6,34 persen. Dimana

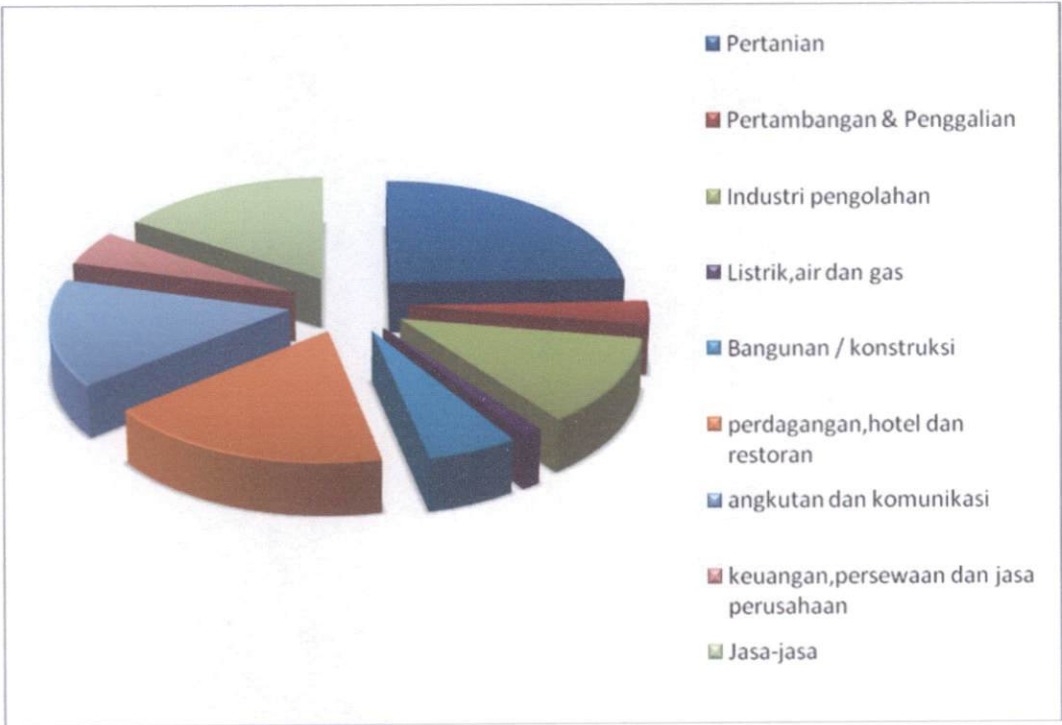
Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sumatera Barat dengan tahun dasar 2000 naik dari 32.912.968,59 milyar tahun 2007 menjadi 35.007.921,57 milyar pada tahun 2008.

Sepanjang tahun 2008 seluruh sektor ekonomi tetap mengalami pertumbuhan yang positif. Untuk melihat Gambaran kontribusi masing – masing sektor usaha serta besar nilai kontribusinya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 4.4

Kontribusi masing – masing sektor usaha terhadap PDRB ADHB

**Propinsi Sumatera Barat tahun
2008**



Sumber : BPS Propinsi Sumatera Barat

Struktur perekonomian Propinsi Sumatera Barat sampai tahun ini masih tetap didominasi oleh sektor pertanian, dimana sektor ini memberikan kontribusi sebesar 24,46 persen pada pembentukan PDRB Propinsi Sumatera Barat Kontribusi sebesar ini, diurutan kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (17,74%), diikuti oleh sektor jasa – jasa (15,68 %) dan sektor pengangkutan dan komunikasi (15,02 %). Sedangkan yang berada diurutan keempat, sektor industri dan pengolahan (12,11 %).

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan perekonomian pada 9 Kabupaten Tertinggal. Berdasarkan data BPS tahun 2008 diketahui laju pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat
Tahun 2002 - 2008

No	Kabupaten	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Padang Pariaman	4.66	4.72	5.27	9.96	19.01	6.11	6.24
2.	Solok	4.34	4.87	5.58	5.87	6.02	6.24	6.35
3.	Solok Selatan	4.76	5.03	5.45	5.70	5.85	6.08	6.12
4.	Dharmasraya	4.72	4.47	5.06	5.46	6.27	6.47	6.54
5.	Pesisir Selatan	4.14	4.35	4.70	5.10	5.22	5.31	5.42
6.	Pasaman	4.21	4.86	5.26	5.61	5.77	5.92	6.08
7.	Pasaman Barat	5.36	5.94	6.47	6.54	6.36	6.41	6.40
8.	Swl/Sijunjung	4.64	4.68	5.71	5.32	5.95	5.61	5.67
9.	Kep. Mentawai	6.08	5.62	4.15	3.38	4.05	4.41	4.48

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Barat

Kabupaten Padang Pariaman memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tertinggi pada tahun 2008. Pada tahun 2008, secara nominal terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan sebesar 155,38 Milyar Rupiah dimana tahun 2007 sebesar 2.489,73 Milyar Rupiah naik menjadi 2.645,12 Milyar Rupiah pada tahun 2008. Produktifitas ekonomi Kabupaten Padang Pariaman secara riil dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan 2000 yang laju pertumbuhan ekonominya 6,24 persen di tahun 2008.

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa Kabupaten Dhamasraya memiliki pertumbuhan ekonomi yang tertinggi diantara 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.54 persen dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling rendah, dengan nilai 4.48 persen.

Jika dilihat secara keseluruhan PDRB/kapita pada 9 Kabupaten Tertinggal rata – rata masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang lebih maju di Sumatera Barat, contohnya berdasarkan data BPS tahun 2008, Kabupaten 50 Kota memiliki PDRB/kapita sebesar 15,14 Juta Rupiah per tahun , Kota Sawahlunto 15,75 Juta Rupiah per tahun. Rata – rata daerah lain memiliki PDRB/kapita diatas 10 (Sepuluh) Juta, sedangkan daerah tertinggal di Sumatera Barat rata – rata masih berada dibawah 10 juta. Jadi dapat diketahui bahwa dari segi PDRB/kapita Daerah tertinggal di Sumatera Barat masih tertinggal dari daerah lainnya yang lebih maju di Sumatera Barat. Dan juga jika diukur dari PDRB/kapita Sumatera Barat rata – rata 9 Kabupaten Tertinggal masih berada dibawah PDRB/kapita Sumatera Barat yang sebesar 14,83 juta Rupiah per tahun.

Jika dilihat pada pertumbuhan ekonomi ,Rata – rata pertumbuhan ekonomi pada 9 Kabupaten terus meningkat tiap tahunnya. Kita lihat saja contohnya pada Kabupaten Solok, berdasarkan data BPS di atas dapat kita lihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok terus meningkat dari tahun 2002 sebesar 4,34 persen menjadi 6,35 persen pada tahun 2008. Struktur perekonomian dari peningkatan pertumbuhan ekonominya, sampai tahun 2008 masih didominasi oleh sektor pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 37,96 persen, diurutan kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai kontribusi sebesar 18,85 persen. Jadi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir tidak ada perubahan struktur perekonomian.

Selanjutnya dapat kita diambil contoh yang lain untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan perubahan stuktur ekonominya yaitu Kabupaten Padang Pariaman , dapat kita lihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman terus meningkat dari tahun 2002 sebesar 4,66 persen menjadi 19,01 persen pada tahun 2006 dan menerun drastis pada tahun 2008 menjadi 6,24. Pada tahun 2006 Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah yang paling tinggi kenaikan pertumbuhan ekonominya diantara 9 Kabupaten Tertinggal dan kabupaten/kota lainnya yang lebih maju di Sumatera Barat. Jika kita lihat struktur perekonomiannya dari peningkatan pertumbuhan ekonominya, sampai tahun 2006 masih didominasi oleh sektor pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 26,3 persen, diurutan ke dua ditempati oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai kontribusi sebesar 22,51 persen. Dan pada urutan ke tiga, ke empat dan ke lima ditempati oleh sektor jasa jasa, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan dengan masing – masing kontribusi sebesar 16,93

persen, 11,12 persen dan 10,33 persen. Jadi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir terjadi perubahan struktur perekonomian, dimana pada tahun 2002 juga didominasi oleh sektor pertanian (30,79 %) dan sektor perdagangan, jasa – jasa (21,24 %) hotel dan restoran (15,00 %), dan industri pengolahan (14,08 %). Jadi dari pertumbuhan ekonomi dari tahun 2002 sampai tahun 2006 terjadi perubahan struktur ekonomi Kabupaten Padang Pariaman, dimana tahun 2006 sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi sektor yang dominan dan berada pada urutan ke dua setelah sektor pertanian.

Selanjutnya perbandingan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Sama dengan diatas contohnya Kabupaten Padang Pariaman dimana dari penjelasan diatas diketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonominya terus tumbuh. Dari data BPS tahun 2003 diketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman mengalami kenaikan penduduk dengan pertumbuhan sebesar 0,63 persen dan terus meningkat menjadi 0,76 persen pada tahun 2006, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dimana pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman sebesar 4,72 persen dan terus meningkat sehingga pada tahun 2006 menjadi 19,01. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu jika terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk maka terjadi pula pertumbuhan ekonomi, hanya saja nilai *marginal* dari pertumbuhannya tidak sebanding. Dari hasil pembahasan lebih tinggi nilai *marginal* pertumbuhan ekonomi dari pada nilai *marginal* pertumbuhan penduduk.

4.3 Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dalam pembangunan sumber daya manusia. Ketertinggalan suatu daerah bisa disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan faktor ini juga ditetapkan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia sebagai kriteria terpilih dalam penentuan ketertinggalan suatu daerah. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kecerdasan masyarakat daerah tertinggal dan menghadapi tantangan – tantangan pada masa yang akan datang, sangat penting dibekali dengan pengetahuan yang memadai. Sehingga kualitas sumber daya manusia semakin baik dan dapat menghadapi tantangan masa depan yang sesuai dengan kemajuan pada daerah lain yang lebih maju di Sumatera Barat.

Salah satu faktor utama dalam meningkatkan pendidikan penduduk pada daerah tertinggal adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada daerah tertinggal tersebut. Disamping faktor sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga akan mempengaruhi. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ketertinggalan dari segi pendidikan dari pada Kabupaten Tertinggal lainnya, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3**Jumlah sarana pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)****Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat tahun 2008**

No	Kabupaten	SD	MI	SLTP	MTs	SLTA	SMK	MA	PT	IPM
1.	Padang Pariaman	401	8	44	22	19	8	7	2	70,09
2.	Solok	331	9	48	27	16	11	9	2	69,52
3.	Solok Selatan	127	9	17	13	7	4	7	3	67,54
4.	Dharmasraya	143	4	25	7	7	3	9	2	67,48
5.	Pesisir Selatan	384	15	45	19	22	10	8	3	69,52
6.	Pasaman	235	9	34	13	10	6	12	2	71,05
7.	Pasaman Barat	225	5	34	40	15	6	23	5	68,84
8.	Swl/Sijunjung	197	2	40	14	10	4	3	2	69,26
9.	Kep. Mentawai	97	1	8	3	5	-	1	-	67,72

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, Bappenas, United Nation

Development Program (UNDP)

Berdasarkan data pada tahun 2008 Tabel 4.3 diatas dapat kita lihat bahwa hanya tersedia 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak satupun Perguruan Tinggi pada Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jika kita bandingkan dengan daerah lain yang lebih maju seperti Kabupaten Tanah Datar, dari data tahun 2008 Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat diketahui bahwa ada 18 jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan 7 Perguruan Tinggi (1 Negeri dan 6 Swasta).

Disamping itu dapat kita lihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 9 Kabupaten Tertinggal masih rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dinilai berdasarkan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata – rata lama sekolah dan beberapa penilaian lainnya. Apabila dilihat secara keseluruhan (agregate) diketahui bahwa nilai IPM 9 Kabupaten Tertinggal masih berada dibawah IPM Propinsi Sumatera Barat yakni sebesar 72,23. IPM pada 9

Kabupaten Tertinggal berarti masih dibawah rata – rata dari 19 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat.

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa rata – rata masyarakat pada daerah tertinggal banyak yang tidak menamatkan sekolah dasar. Contohnya untuk Kabupaten Pasaman Barat, Secara umum tingkat pendidikan formal masyarakat Kabupaten Pasaman Barat masih relatif rendah, dimana 15% tidak tamat SD, 30 % tidak menamatkan SLTP dan 50% juga tidak tamat SLTA. Diperkirakan 80% yang tidak menamatkan pendidikan formal berada di daerah tertinggal. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang masih sangat terbatas, dimana 87 % sarana prasarana pendidikan sekolah rusak berat, dan rata-rata didaerah tertinggal hanya memiliki sekolah dasar (SD), untuk sekolah lanjutan pertama (SLTP) jauh dari tempat tinggal mereka.

Dari kondisi diatas dapat kita simpulkan bahwa permasalahannya bermula berputar dari perekonomian dan pendidikan. Sesuai dengan Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*the Vicious Circle of Poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953(Mudrajad Kuncoro,2000) yaitu pendidikan/skill yang rendah menyebabkan kemiskinan dan karena miskin maka tidak bisa sekolah. Hal ini terus berputar tanpa ujung dan pangkal. Jadi disinilah diharapkan peran pemerintah untuk memutuskan tali lingkaran ini dengan kebijakan pembangunannya yang memprioritaskan pembangunan pada daerah tertinggal untuk memutuskan tali lingkaran setan kemiskinan tersebut.

4.4 Kesehatan

Pada tahun 2008 masih ada Kabupaten yang belum memiliki rumah sakit umum sendiri. Tabel 4.4 berikut adalah keterangan mengenai jumlah tenaga medis dan sarana rumah sakit pada Kabupaten Tertinggal.

Tabel 4.4

Jumlah RSU dan Tenaga Medis pada Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat Tahun 2008

No	Kabupaten	RSU	Puskesmas	Tenaga Medis				
				Dokter Umum	Dokter Sp.	Perawat	Bidan	Apoteker
1.	PadangPariaman	1	24	28	-	182	182	-
2.	Solok	1	18	17	3	159	204	-
3.	Solok Selatan	1	7	5	1	98	59	3
4.	Dharmasraya	1	8	46	4	109	119	2
5.	Pesisir Selatan	1	18	44	5	180	167	3
6.	Pasaman	1	13	21	3	58	107	7
7.	Pasaman Barat	1	16	28	3	156	202	2
8.	Swl/Sijunjung	-	12	24	-	108	144	-
9.	Kep. Mentawai	1	7	28	-	138	33	1

Sumber : Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 diatas dapat kita lihat bahwa dari 9 Kabupaten Tertinggal di Propinsi Sumatera Barat hanya 1 kabupaten yang belum mempunyai rumah sakit umum daerah yaitu Kabupaten Sijunjung. Namun pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Sijunjung sedang tengah mempersiapkan pembangunan Rumah Sakit Umum yang nantinya pada tahun 2011 pembangunan Rumah Sakit Umum telah rampung diselesaikan dan langsung bisa dioperasikan. Dari hasil pengamatan ternyata Kabupaten hasil pemekaran di Sumatera Barat sudah memiliki rumah sakit umum daerah sendiri, Kabupaten

tersebut adalah Kabupaten Dharmasraya, Pasaman Barat dan Solok Selatan. Jika dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju di Sumatera Barat, semuanya sudah memiliki rumah sakit umum daerah sendiri.

Dari tabel 4.4 diatas juga terlihat bahwa prasarana kesehatan berupa puskesmas sudah dimiliki oleh semua Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat. Jika kita lihat dari segi tenaga medisnya rata – rata Kabupaten Tertinggal sudah mempunyai tenaga medis beberapa dokter umum, dokter spesialis, bidan dan perawat. Hanya saja keterbatasan pada tingkat Dokter Spesialis, masih ada kabupaten yang tidak mempunyai tenaga medis berupa Dokter Spesialis yaitu Kabupaten Sijunjung, Padang Pariaman dan Kepulauan Mentawai.

Permasalahan yang muncul pada bidang kesehatan pada daerah tertinggal adalah dimana posisi/letak fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan jauh dari daerah tertinggal atau terpencil, sehingga masyarakat pada daerah tersebut mendapatkan pelayanan rumah sakit yang minim. Disamping itu biaya rumah sakit yang mahal membuat masyarakat tersebut kalau sakit lebih memilih berobat alternatif atau ke dukun. Dan pada daerah tertinggal adanya budaya untuk lebih memilih berobat ke dukun dari pada ke rumah sakit. Permasalahan kesehatan yang sering dialami oleh masyarakat pada daerah tertinggal adalah gizi buruk. Berikut adalah gambar kondisi gizi buruk yang dialami oleh dari balita Kabupaten Padang Pariaman:

Gambar 4.5

Balita Gizi Buruk Pada Daerah Tertinggal di Sumatera Barat



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Gambar 4.4 diatas merupakan balita pada Kabupaten Padang Pariaman yang berada pada daerah tertinggal. Berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2008 diketahui bahwa terdapat 3.615 balita gizi buruk dan balita yang sangat kurus atau 41,4 persen dari jumlah Balita pada Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disebabkan oleh masalah perekonomian keluarga dan jauhnya pelayanan kesehatan dari tempat pemukiman warga daerah tertinggal (Bappeda Padang Pariaman). Masalahnya masih sesuai dengan Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*the Vicious Circle of Poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnarnurse 1953. Jadi kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini di arahkan untuk meningkatkan kesehatan rakyat pada daerah tertinggal di Sumatera Barat.

4.5 Infrastruktur

Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang baik pada Kabupaten Tertinggal masih kebanyakan berada pada sekitar pusat – pusat perekonomian dan pemerintahan. Bahkan ada daerah yang tidak bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan. Berdasarkan data Tabel 4.5 berikut dapat kita lihat bahwa rata – rata kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Tertinggal masih banyak yang rusak, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Panjang Jalan dan Jembatan pada Kabupaten Tertinggal
di Propinsi Sumatera Barat tahun 2008

No	Kabupaten	Jembatan M ²	Jalan Kabupaten (Km ²)		Jalan Propinsi (Km ²)		Jalan Negara (Km ²)		Jumlah
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	
1.	Padang Pariaman	521,30	517,83	796,37	62,28	16,25	76,10	19,50	1.488,33
2.	Solok	1.787,00	644,81	592,52	12,00	106,09	66,21	-	1.421,63
3.	Solok Selatan	1.341,60	49,70	1.284,4	102,2	111,29	-	-	1.482,99
4.	Dharmasraya	1.128,00	429,40	25,00	58,85	25,00	46,80	15,70	841,20
5.	Pesisir Selatan	3.285,30	658,90	683,60	56,90	11,00	213,00	10,00	1633,40
6.	Pasaman	455,50	259,40	516,70	70,23	6,00	61,00	37,50	950,83
7.	Pasaman Barat	1.956,84	444,80	768,57	75,10	-	131,50	-	1.419,97
8.	Swl/Sijunjung	2.366,90	484,40	415,9	40,70	9,50	37,00	68,91	1.056,41
9.	Kep. Mentawai	292,00	58,00	464,40	-	-	-	-	522,40

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kimpraswil 9 Kabupaten Tertinggal.

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa kondisi jalan yang rusak paling banyak terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari 522,40 Km² jalannya ternyata 464,40 Km² merupakan jalan rusak dan hanya 58 Km² jalan

yang baik. Berarti dari jalan yang tersedia hanya 11,10 persen yang baik. Ini sangat memprihatinkan dan sangat tertinggal dari daerah lainnya di Sumatera Barat. Sedangkan dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten yang paling luas di Sumatera Barat.

Data yang diperoleh dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah jalan – jalan tersebut kebanyakan berada di pusat perekonomian dan pemerintahan. Jadi pada daerah tertinggal dan terisolir ada yang tidak memiliki infrastruktur jalan yang baik, bahkan ada yang hanya jalan setapak untuk menuju pada daerah tertinggal. Jika dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju seperti pada Kabupaten Tanah Datar, dari data berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum tahun 2008 terdapat 54,32 persen jalan yang baik atau sepanjang 559,30 Km² dari seluruh panjang jalan 1.029,60 Km². Jika dilihat untuk kondisi jembatan di Daerah Tertinggal banyak jembatan yang memerlukan perbaikan, bahkan ada jembatan yang hanya menggunakan bahan baku dari sekitar lokasi sungai seperti kayu kelapa. Berikut adalah contoh gambar jembatan rusak pada Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2008 yang bersumber dari Bappeda Kabupaten Pasaman Barat

Gambar 4.6

Jembatan Rusak Pada Daerah Tertinggal Di Sumatera Barat



Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bahwa terdapat kerusakan jembatan pada daerah tertinggal yang butuh perbaikan secepatnya. Dan dari data pada Dinas Pekerjaan Umum diketahui jembatan yang rusak berada pada jalan yang jauh dari pusat perekonomian dan pemerintahan. Jembatan ini merupakan penghubung antara daerah yang lebih maju dengan daerah tertinggal. Jadi disini dapat disimpulkan.bahwa jalan dan jembatan memiliki peranan yang penting pada kemajuan suatu daerah, karena akses perubahan suatu daerah melalui jalan.

Jika kita lihat dari segi perumahan pada daerah tertinggal sangat memprihatinkan berikut adalah contoh gambarnya :

Gambar 4.7

Perumahan Daerah Tertinggal di Sumatera Barat



Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Pariaman

Perumahan pada daerah tertinggal di Sumatera Barat sangat memprihatinkan, bahkan ada perumahan warga yang tidak memiliki fasilitas vitalnya seperti MCK, dimana masyarakat tersebut harus pergi ke sungai untuk mandi dan mencuci. Berikut adalah contoh data dari perumahan pada Kabupaten Solok Selatan tahun 2008 dari Bappeda Kabupaten Solok Selatan yaitu terdapat 30.210 rumah penduduk dengan rincian 26.220 rumah sendiri dan 3990 rumah

sewa. Jika dilihat dari penyebaran rumah pada daerah tertinggal masih terkonsentrasi pada beberapa kecamatan atau nagari. Seperti pada Kabupaten Solok Selatan terkonsentrasi pada 3 kecamatan yaitu : Kecamatan Sangir, Sungai Pagu dan Sangir Jujuan. Sedangkan untuk 2 kecamatan lainnya (Koto Parik Gadang diateh dan Sangir Batang Hari) masih jarang dan penyebarannya masih linear dan paralel mengikuti arus jalan.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa perumahan masyarakat pada daerah tertinggal masih memprihatinkan. Dari Gambar 4.6 diatas merupakan kondisi perumahan pada Kabupaten Tertinggal. Oleh karena itu pemerintah di daerah tersebut, propinsi dan pusat agar menyiapkan kebijakan, program dan kegiatan untuk membangun daerah tersebut agar daerah tersebut setara dengan daerah lain yang maju.

4.6 Faktor Penyebab Daerah Tertinggal

Tidak semua daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, ketertinggalan suatu daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan ketertinggalan suatu daerah berdasarkan pembahasan sebelumnya dan laporan kegiatan fasilitasi pembangunan daerah tertinggal tahun 2008 yaitu:

4.6.1 Kondisi Geografis

Kondisi geografis yang tidak memiliki potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Alam tersebut tidak dapat dimanfaatkan akan menyebabkan ketertinggalan suatu daerah. Kondisi geografis kabupaten tersebut sebagian besar daerah yang masih sulit dijangkau. Sulitnya aksesibilitas sebagian wilayah

disebabkan oleh kondisi daerah yang sebagian besar masih merupakan hutan, bergunung-gunung, aliran sungai yang deras, dan berjurang-jurang. Infrastruktur jalan ke daerah terpencil dan sangat terpencil hutan dan perkebunan sehingga masih belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, sehingga mobilitas kehidupan dan aktifitas ekonomi masyarakat menjadi rendah.

4.6.2 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari kualitas pendidikan baik dari segi anak didik maupun tenaga pendidik. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendidikan serta tingkat kesejahteraan tenaga pendidik.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kualitasnya, sehingga dapat diwujudkan kabupaten yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan semata akan tetapi dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dari berbagai sektor. Pembangunan kesehatan di daerah tertinggal relatif masih kurang dan perlu ditingkatkan, terbukti dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

4.6.3 Kondisi Ekonomi Dan Kemiskinan

Kondisi ekonomi di daerah tak terlepas dari pengaruh nasional dengan belum pulihnya kondisi perekonomian Indonesia sebagai akibat krisis ekonomi yang masih dirasakan hingga saat ini. Selain itu tingkat inflasi yang cukup tinggi mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta

perubahan ekonomi secara nasional juga sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat seperti kenaikan BBM, kenaikan harga bahan pokok dan kelangkaan bahan-bahan kebutuhan masyarakat.

Selain faktor eksternal tersebut, faktor internal yang juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tertinggal adalah masih terbatasnya pengelolaan sektor ekonomi kerakyatan disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan daya saing masyarakat, keterbatasan dan lemahnya akses, lemahnya posisi tawar pelaku ekonomi dan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung ekonomi. Permasalahannya kita kembali sesuai dengan Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*the Vicious Circle of Poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953. Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri – ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang memprogramkan pengentasan kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

4.6.4 Sarana dan Prasarana Yang Terbatas

Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi fisik penyebab ketertinggalan yakni kondisi infrastruktur seperti jalan dan jembatan, penggunaan listrik, telepon, air bersih, kesehatan, pendidikan, perbankan, pasar dan pelayanan

publik lainnya dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Kurangnya infrastruktur yang merupakan faktor input ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap output, sehingga faktor ini dapat dikatakan sebagai kriteria dasar suatu ketertinggalan.

4.6.5 Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial

Daerah rawan bencana merupakan faktor penyebab ketertinggalan suatu daerah. Karena bencana gempa atau longsor infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada dapat rusak atau hancur. Sehingga daerah yang rawan bencana tersebut semakin terbatas sarana dan prasarananya semakin terbatas. Disamping itu investor tidak mau berinvestasi pada daerah rawan bencana tersebut karena dengan berinvestasi daerah tersebut dapat menyebabkan kerugian akibat bencana tersebut.

Selain itu daerah rawan konflik sosial juga menyebabkan ketertinggalan suatu daerah. Ini biasanya terjadi pada daerah pedalaman. Tindakan anarkis dari para masyarakat yang terlibat konflik sosial menyebabkan rusak atau hancurnya sarana dan prasarana yang ada, sehingga ini juga menyebabkan ketertinggalan suatu daerah.

4.6.6 Efek Kebijakan Pembangunan Yang Tidak Tepat

Penyebab ini berhubungan dengan bagaimana kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut. Tidak meratanya pembangunan dan pembangunan yang memusat menyebabkan daerah yang berada selain di pusat

pemerintahan atau perekonomian akan tertinggal dibandingkan dengan daerah yang berada di pusat pemerintahan atau perekonomian.

4.7 Permasalahan Daerah Tertinggal Di Sumatera Barat

Berikut akan dijelaskan beberapa permasalahan pada daerah tertinggal di Sumatera Barat. Dimana data ini berasal dari publikasi masing – masing Bappeda Kabupaten dan data juga diperoleh dari Profil daerah yang dipublikasikan Bappeda dan Kabupaten dalam angka publikasi BPS dan Bappeda Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat.

4.7.1 Kabupaten Padang Pariaman

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa permasalahan pada Kabupaten Padang Pariaman, penjelasannya adalah sebagai berikut:

4.7.1.1 Sumber Daya Alam

Secara umum masyarakat miskin di Kabupaten Padang Pariaman yang berada di pemerintahan terendah atau nagari terletak jauh dari pusat-pusat perekonomian dan pusat budaya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan transportasi, komunikasi maupun pelayanan publik. Pada tahun 2004 bencana gempa mengguncang Kabupaten Padang Pariaman 122 kali berdampak pada hancurnya perumahan masyarakat dan prasarana umum lainnya, sehingga ini menyebabkan ketertinggalan dari segi ekonomi, disamping curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan terjadi banjir pada beberapa kecamatan.

Rata-rata masyarakat miskin di Kabupaten Padang Pariaman tidak mempunyai lahan yang memadai, karena lahan tersebut dimiliki hanya secara adat

sehingga tidak dapat melakukan pengelolaan lahan secara utuh. Kemampuan dalam pengelolaan lahan sangat rendah sekali karena kurangnya sumber daya manusia dan prasana penunjang.

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan data BPS tahun 2006 sebagai berikut:

- a. Perkebunan 26,41 %
- b. Sawah 21,37%
- c. Kebun Campuran 13,65%
- d. Hutan dan Semak 8,01 %

Sumber daya alam merupakan faktor produksi dasar yang berfungsi sebagai basis dalam melakukan aktivitas produksi tertentu. Karenanya ketersediaan faktor ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan wilayah dan angka kemiskinan pada daerah tersebut. Dalam kontek rumah tangga di kenagarian, ketersediaan sumber daya alam merupakan faktor penentu utama kinerja ekonomi rumah tangga. Rumah tangga dengan pemilikan asset produktif dalam bentuk lahan yang relatif luas, mampu membangun kinerja ekonomi rumah tangga yang lebih baik.

Kondisi Kabupaten Padang Pariaman secara geografis banyak berada di pesisir pantai sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Curah hujan yang cukup tinggi sering menyebabkan luapan-luapan air sungai, rata-rata hulu dari sungai tersebut kondisi alamnya tidak lagi produktif untuk menahan debit air. Terjadi banjir mengakibatkan banyak fasilitas umum rusak dan

banyaknya kerugian harta benda masyarakat yang terkena banjir. Disamping daerah pinggir pantai juga sering terjadi abrasi pantai, angin badai dan gempa pergeseran patahan yang melanda Kabupaten Padang Pariaman.

4.7.1.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia, maka IPM Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan data dari BPS, Bappenas dan UNDP tahun 2007 (70,09) lebih rendah dari IPM propinsi Sumatera Barat (72,23). Hal ini disebabkan oleh rendahnya mutu, kualitas pendidikan dan juga faktor internal masyarakat. Dari data yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Padang Pariaman misalnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2007 baru mencapai 7,13 tahun, dimana angka tersebut lebih rendah dari rata-rata lama sekolah Propinsi Sumatera Barat telah mencapai 8,18 tahun pada tahun 2007. Kondisi kualitas sumber daya manusia (SDM) masih relatif rendah 32,86% tamat SD sedangkan yang tidak tamat SD 57,19%. Jika dilihat dari partisipasi sekolah juga menggambarkan penurunan dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas, yaitu sebesar 97,68% pada umur 7 sampai 12 tahun, 88,94% pada umur 13 sampai 15 tahun, dan 62,05% 16 sampai 18 tahun. Disamping itu dari segi kualitas tenaga pengajar pada tingkat SLTA lebih dari 10% (12,28%) pendidikannya masih banyak yang belum Sarjana (S1). Yaitu masih Diploma III, bahkan masih ada yang Diploma II.

4.7.1.3 Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Permasalahan selanjutnya adalah masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu 51.708 orang (13,35%) dari jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah orang. Kabupaten Padang Pariaman memiliki penduduk miskin pada posisi ke tiga terbanyak dari 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya modal, tidak terampil dan tidak mempunyai skill. Selain itu faktor eksternal seperti belum efektifnya pelaksanaan program bantuan modal bagi usaha kecil dan menengah pada masyarakat.

Selain itu, jumlah pengangguran pada Kabupaten Padang Pariaman juga banyak, berada pada posisi ke tiga jumlah pengangguran terbanyak diantara 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat, yaitu 11.435 orang dari 165.684 jumlah angkatan kerja pada Kabupaten Padang Pariaman. Pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya lulusan pada SLTA dan Perguruan Tinggi yang tidak atau kurang terampil dan tidak memiliki skill.

4.7.1.4 Sarana dan Prasarana

Permasalahan selanjutnya adalah masih terbatasnya atau masih rendahnya kualitas prasarana jalan pada daerah – daerah tertinggal yang jauh dari pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Hal ini tergambar dalam masih banyaknya jalan kabupaten yang rusak yaitu sepanjang 623,75 Km atau lebih dari 50 % jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Pada bidang kesehatan Kabupaten Padang Pariaman masih kekurangan dokter spesialis dan peralatan serta prasarana kesehatan yang lengkap. Hal ini menyebabkan setiap pasien yang gawat darurat dimana tidak ada dokter spesialisnya dan Peralatannya pada Kabupaten Padang Pariman selalu dilarikan ke Rumah Sakit M. Jamil Padang.

Disamping itu masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan pada Perguruan Tinggi yaitu sampai tahun 2008 ada 2 Perguruan Tinggi Swasta. Jadi permasalahannya banyak dari siswa yang pindah pergi ke Padang untuk melanjutkan studinya pada perguruan tinggi negeri. Karena tidak adanya perguruan tinggi negeri di Kabupaten Padang Pariaman.

4.7.2 Kabupaten Solok

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa permasalahan pada Kabupaten Solok, penjelasannya adalah sebagai berikut:

4.7.2.1 Sumber Daya Alam

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, tipologi daerah tertinggal di Kabupaten Solok berdasarkan kondisi geografis dan topografi dapat dikategorikan kedalam 4 tipe yaitu : daerah lahan kritis, daerah miskin perkotaan, daerah pegunungan dan daerah terpencil. Masing-masing tipe tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga untuk penanganannya juga memerlukan pemberlakuan yang berbeda pula

Daerah lahan kritis yang terkonsentrasi di bagian utara wilayah kabupaten pada umumnya berada disekitar Danau Singkarak. Sulitnya masyarakat untuk

mengembangkan pertanian karena lahan yang kering dan kritis memerlukan investasi yang besar untuk mengolah lahan. Rendahnya produksi tanaman masyarakat dengan kualitas yang dibawah standar belum dapat meningkatkan pendapatan mereka untuk hidup layak. Disamping itu perbukitan kritis yang mengitari Danau Singkarak setiap saat cenderung mengancam sumber air danau. Hal ini mengkhawatirkan, mengingat Danau Singkarak merupakan sumber mata pencaharian masyarakat sekitarnya dan airnya merupakan sumber energi pembangkit listrik PLTA Singkarak yang menjadi sumber pasokan listrik untuk Propinsi Sumbar, Riau dan Jambi.

Masih banyak potensi sumber daya alam yang belum dapat diolah. Hal ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya investasi publik dan swasta serta masih banyaknya sumberdaya alam yang berlokasi di kawasan hutan konservasi.

Gunung Talang sebagai gunung berapi aktif seringkali mengancam masyarakat Kabupaten Solok dengan letusannya. Terbukti pada tahun 2005 yang lalu gunung ini meletus dengan hebatnya dan memaksa puluhan ribu penduduk mengungsi menjauh dari sekitar gunung. Hancurnya lahan pertanian dan pemukiman penduduk akibat letusan itu menimbulkan beban yang berat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

4.7.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia sebagai variabel utama dalam melakukan pembangunan daerah, di Kabupaten Solok juga masih rendah. Berdasarkan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan pada tahun 2007 yang dilakukan oleh BPS, IPM Kabupaten Solok mencapai 69,29. IPM Kabupaten

Solok ini lebih rendah dari IPM propinsi Sumatera Barat (72,23). Penyebabnya sama dengan Kabupaten Padang Pariman yaitu dari segi mutu dan kualitas pendidikan.

4.7.2.3 Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Permasalahan selanjutnya adalah masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Solok yaitu 58.971 orang (16,57%) dari jumlah penduduk Kabupaten Solok yang berjumlah 355.705 orang. Kabupaten Solok memiliki penduduk miskin pada posisi ke dua terbanyak dari 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya modal, tidak terampil dan tidak mempunyai skill. Selain itu faktor eksternal seperti belum efektifnya pelaksanaan program bantuan modal bagi usaha kecil dan menengah pada masyarakat.

Selain itu, jumlah pengangguran pada Kabupaten Solok juga banyak, berada pada posisi ke dua jumlah pengangguran terbanyak diantara 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat, yaitu 12.742 orang dari 166.784 jumlah angkatan kerja pada Kabupaten Solok.

4.7.2.4 Sarana dan Prasarana

Prasarana jalan dan jembatan ke daerah tertinggal juga belum memadai, bahkan beberapa ruas jalan berada dalam kondisi yang rusak parah dan tidak dapat dilalui sewaktu musim hujan. Hal ini tergambar 131,22 Km jalan kabupaten rusak pada tahun 2008. Keterbatasan sarana dan prasarana telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh daerah dalam wilayah Kabupaten Solok menghambat percepatan pemberian pelayanan informasi pembangunan, baik dari atas ke bawah

maupun sebaliknya. Belum tersedianya jaringan telepon, media elektronik maupun cetak seringkali memposisikan masyarakat berada dalam kondisi keterisoliran dan terasing.

Permasalahan pada bidang kesehatan dan pendidikan sama dengan pada Kabupaten Padang Pariaman yaitu belum adanya Dokter Spesialis pada Kabupaten Solok, jadi setiap ada pasien yang sakit perlu penanganan Dokter Spesialis, maka pasien tersebut harus dibawa ke Kota Solok atau ke Kota Padang. Pada bidang pendidikan belum adanya perguruan tinggi negeri.

4.7.3 Kabupaten Solok Selatan

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa permasalahan pada Kabupaten Solok Selatan, penjelasannya adalah sebagai berikut:

4.7.3.1 Sumber Daya Alam

Secara umum masyarakat miskin di Kabupaten Solok Selatan yang berada di pemerintahan terendah (Nagari) terletak jauh dari pusat-pusat perekonomian dan pusat budaya sehingga sulit di jangkau oleh jaringan transportasi, komunikasi maupun pelayanan publik. Kondisi geografis Kabupaten Solok Selatan sebagian besar (55,73%) masih berstatus hutan negara dan 6,84 persen berstatus hutan rakyat. Dari hasil publikasi Bappeda Kabupaten Solok Selatan, daerah yang paling tertinggal adalah Kecamatan Sangir Batang Hari, terutama Nagari Lubuk Ulang Aling dan Nagari Dusun Tengah dimana Transportasi untuk kedaerah tersebut sangat sulit. Untuk Nagari Lubuk Ulang Aling harus memakai Tempek atau perahu mesin karena jalan kedaerah tersebut tidak ada. Sedangkan untuk Nagari

Dusun Tengah harus melalui jalan tanah yang sangat sulit dan kalau hari hujan maka tidak bisa melauai jalan tersebut dilalui.

Masih banyak potensi sumber daya alam yang belum dapat diolah. Hal ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya investasi publik dan swasta serta masih banyaknya sumberdaya alam yang berlokasi di kawasan hutan konservasi. Dari data yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Solok Selatan kawasan hutan ini lebih dari sebagian luas Kabupaten Solok Selatan, yaitu 55,73 persen pada Hutan Negara.

4.7.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia sebagai variabel utama dalam melakukan pembangunan daerah, di Kabupaten Solok Selatan juga masih rendah. Berdasarkan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan pada tahun 2007 yang dilakukan oleh BPS, IPM Kabupaten Solok Selatan baru mencapai 67,54. IPM Kabupaten Solok Selatan ini lebih rendah dari IPM propinsi Sumatera Barat (72,23).

4.7.3.3 Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Permasalahan selanjutnya adalah masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan yaitu 38.807 orang (29,37%) dari jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan yang berjumlah 132.093 orang. Kabupaten Solok Selatan memiliki penduduk miskin pada posisi ke enam terbanyak dari 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya modal, tidak terampil dan tidak mempunyai skill.

Selain itu faktor eksternal seperti belum efektifnya pelaksanaan program bantuan modal bagi usaha kecil dan menengah pada masyarakat.

Selain itu, jumlah pengangguran pada Kabupaten Solok Selatan juga banyak, berada pada posisi ke delapan jumlah pengangguran terbanyak diantara 9 Kabupaten Tertinggal di Propinsi Sumatera Barat, yaitu 4374 orang dari 57.192 jumlah angkatan kerja pada Kabupaten Solok Selatan.

4.7.3.4 Sarana dan Prasarana

Kondisi jalan yang berupa jalan tanah dan kerikil dengan kondisi yang rusak ini mengakibatkan sulitnya untuk melakukan perjalanan dari dan menuju ke wilayah perencanaan. Disamping itu permasalahan lainnya adalah Kurangnya sarana produksi di wilayah perencanaan sehingga masyarakat lebih cenderung untuk bekerja secara manual, Pelayanan fasilitas telepon oleh Telkom masih menggunakan sistim satelit/radio dengan jumlah pemakai masih terbatas, pelayanan air bersih oleh PDAM dan juga masih ada nagari yang belum masuknya prasarana listrik serta Kurangnya lembaga pendidikan non formal untuk menunjang usaha tani.

Kondisi fisik sarana dan prasarana pendidikan khususnya Sekolah Dasar sangat memprihatinkan. Dari 125 Sekolah Dasar (SD) yang ada baik negeri maupun swasta, maka 60 buah SD (48 %) berada dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang yang perlu perbaikan secepatnya karena tidak layak lagi untuk proses belajar dan mengajar.

Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian melalui kegiatan pra produksi hingga pasca panen, seperti irigasi yang masih belum permanen, aksesibilitas yang rendah, pasar yang belum luas.

Permasalahan pada prasarana kesehatan adalah masih belum lengkapnya peralatan medis dan masih kurangnya tenaga medis dan paramedis. Seperti Dokter Spesialis.

4.7.4 Kabupaten Dharmasraya

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa permasalahan pada Kabupaten Dharmasraya, penjelasannya adalah sebagai berikut :

4.7.4.1 Sumber Daya Alam

Keadaan geografis Kabupaten Dharmasraya yang sebagian besar daerah yang masih tertinggal sulit dijangkau. Sulitnya aksesibilitas sebahagian wilayah disebabkan oleh kondisi daerah yang sebahagian besar masih merupakan hutan (bergunung- gunung, aliran sungai yang deras, dan berjurang-jurang) serta infrastruktur jalan ke daerah terpencil dan sangat terpencil (Hutan dan Perkebunan) sehingga masih belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, sehingga mobilitas kehidupan dan aktifitas ekonomi masyarakat menjadi rendah.

Sumberdaya manusia sebagai variabel utama dalam melakukan pembangunan daerah, di Kabupaten Dharmasraya juga masih rendah. Berdasarkan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan pada tahun 2007 yang dilakukan oleh BPS, IPM Kabupaten Dharmasraya mencapai 67,48. dimana IPM

Kabupaten Dharmasraya ini lebih rendah dari IPM propinsi Sumatera Barat (72,23).

4.7.4.2 Sumber Daya Manusia

Permasalahan selanjutnya adalah masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya yaitu 13.661 orang (7,55 %) dari jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang berjumlah 180.915 orang. Kabupaten Dharmasraya memiliki penduduk miskin pada posisi ke enam terbanyak dari 9 Kabupaten Tertinggal di Propinsi Sumatera Barat. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya modal, tidak terampil dan tidak mempunyai skill. Selain itu faktor eksternal seperti belum efektifnya pelaksanaan program bantuan modal bagi usaha kecil dan menengah pada masyarakat.

Selain itu, jumlah pengangguran pada Kabupaten Dharmasraya juga banyak, berada pada posisi ke tujuh diantara 9 Kabupaten Tertinggal di Propinsi Sumatera Barat, yaitu 5360 orang dari 80.911 jumlah angkatan kerja pada Kabupaten Dharmasraya.

4.7.4.3 Sarana dan Prasarana

Sasaran pembangunan di bidang prasarana dasar adalah pada ketersediaan prasarana jalan, irigasi, dan lingkungan permukiman serta penataan ruang wilayah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Dari data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya terdapat 265,80 Km Jalan Kabupaten yang rusak atau lebih dari setengah Jalan Kabupaten. Keberadaan irigasi Batang Hari yang diharapkan akan mampu mengairi areal

persawahan seluas 18.936 Ha di wilayah Kabupaten Dharmasraya, hingga saat ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan sektor pertanian \pm 4.986 Ha.

Namun saat ini masih terdapat beberapa Daerah Irigasi (DI) yang belum terjangkau oleh Bendung Irigasi batang Hari (BIBH), yaitu sebanyak 77 Daerah Irigasi dengan luas areal yang diairi 5.156 Ha.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) saat ini belum dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya, mengingat potensi yang cukup besar di bidang perikanan darat keberadaan TPI untuk masa yang akan datang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas sektor perikanan darat di Kabupaten Dharmasraya .

Pada sarana pendidikan dan kesehatan adalah gedung SD/MI dari 149 gedung sebagian besar berada dalam kondisi rusak yaitu sebanyak 68 unit berada dalam kondisi rusak berat dan sebanyak 46 unit dalam kondisi rusak ringan, dan yang kondisinya baik hanya 30 unit sedangkan 5 unit gedung MI dan SD Swasta berada dalam kondisi rusak ringan. Sedangkan untuk bangunan SLTP dan SLTA dalam keadaan rusak ringan, namun untuk gedung MTs dan MAS kondisinya kurang memadai. Sarana Kesehatan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya secara umum terdapat 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah yang terletak di Pulau Punjung dengan tipe C, keberadaan RSUD ini secara umum cukup membantu dalam pelayanan kesehatan masyarakat walaupun belum cukup memadai. Dengan keterbatasan yang ada khususnya yang terkait dengan sarana dan prasarana penunjang serta keberadaan tenaga medis perlu peningkatan lebih lanjut terhadap RSUD maupun sarana kesehatan lainnya.

Disamping itu permasalahan pada bidang perkebunan adalah belum tersedianya bibit unggul yang terjamin dalam jumlah yang cukup, kualitas dan mutu yang rendah, harga yang rendah, rendahnya pengetahuan petani tentang penanganan pasca panen, tidak berkembangnya industri pengolahan dan tidak adanya kepastian pasar. Selain itu permasalahan pada bidang kehutanan adalah Masih tingginya pelanggaran hukum di bidang kehutanan dalam bentuk pembalakan liar (illegal logging). Hal ini mungkin disebabkan faktor ekonomi masyarakat yang memiliki ketergantungan kepada hutan sebagai sumber mata pencahariannya.

4.7.5 Kabupaten Pesisir Selatan

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa permasalahan pada Kabupaten Pesisir Selatan, penjelasannya adalah sebagai berikut :

4.7.5.1 Sumber Daya Alam

Wilayah sebelah timur merupakan perbukitan yang didominasi oleh kawasan hutan, terutama kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Wilayah TNKS dan hutan lindung merupakan wilayah yang diproteksi dari pemanfaatan aktifitas perekonomian yang akan mengganggu keseimbangan ekologis hutan tersebut.

Kondisi geografis wilayah seperti ini menyulitkan pemerintah daerah dalam mencari terobosan pembangunan, bahkan untuk pengembangan jalur transportasi daerah juga kesulitan karena wilayah perbatasan melewati kawasan TNKS tersebut.

Permasalahan utama tidak mempunya petani komoditi sawit pada Kabupaten Pesisir Selatan berkembang sebagaimana mestinya adalah faktor lemahnya posisi tawar petani dalam menentukan harga jual komoditi, sedangkan untuk petani yang tidak memiliki lahan, harga upah buruh sangat rendah namun karena tidak adanya alternatif pekerjaan lain yang dapat dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, maka pekerjaan tersebut tetap mereka terima.

Yang menjadi persoalan besar dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah bagaimana pengelolaan yang berwawasan lingkungan belum terakses permodalan serta penguasaan teknologi yang masih rendah.

Seringnya suatu daerah mengalami bencana alam menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan. Berdasarkan kejadian bencana alam yang pernah terjadi di Pesisir Selatan adalah longsor, banjir, gelombang pasang dan badai sebagai fenomena alam yang tidak hanya terjadi di Pesisir Selatan saja. Tingginya intensitas bencana longsor di Kabupaten Pesisir Selatan akibat dari tingginya curah hujan dan maraknya penebangan liar, belum lagi bencana lainnya yang juga merupakan ikutan/dampak dari penebangan liar tersebut seperti banjir bandang. Kejadian naiknya air pasang di daerah pantai hampir setiap tahun terjadi, sehingga rumah penduduk nelayan tepi pantai rusak berat (gelombang pasang Air Haji tahun 2004 merusakkan 30 unit rumah).

4.7.5.2 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia sebagai variabel utama dalam melakukan pembangunan daerah, di Kabupaten Pesisir Selatan juga masih rendah. Berdasarkan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan pada

tahun 2007 yang dilakukan oleh BPS, IPM Kabupaten Pesisir Selatan baru mencapai 69,52. dimana IPM Kabupaten Pesisir Selatan ini lebih rendah dari IPM propinsi Sumatera Barat (72,23).

4.7.5.3 Sarana dan Prasarana

Prasarana jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan masih sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitas, hal ini terbukti dengan masih ada beberapa kawasan/nagari yang sulit ditempuh kendaraan roda empat dan roda dua seperti kawasan kenagarian Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan.

Keterbatasan jaringan jalan berdampak pada kurangnya aksesibilitas, rendahnya mutu pendidikan masyarakat, rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan rendahnya kesejahteraan masyarakat akibat dari tidak berjalannya aktifitas ekonomi.

4.7.6 Kabupaten Pasaman

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa permasalahan pada Kabupaten Pasaman, penjelasannya adalah sebagai berikut:

4.7.6.1 Sumber Daya Alam

Secara geografis, umumnya daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena yang letaknya jauh di pedalaman, daerah perbukitan/pegunungan sehingga sangat sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun komunikasi.

Beberapa daerah tertinggal di Kabupaten Pasaman terletak pada beberapa gunung atau perbukitan seperti gunung Ambun di Bonjol, Gunung Sigapuak dan

Kelabu di Dua Koto, Malenggang di Rao dan Gunung Tambin yang merupakan Gunung tertinggi yang terletak di wilayah Kecamatan Lubuk Sikaping yang mana sarana jaringan jalan belum tersedia dengan baik, begitu juga dengan jaringan komunikasi, sehingga sulit untuk pengembangan pembangunan di daerah tersebut.

Kabupaten Pasaman memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, seperti perikanan, kehutanan dan perkebunan, peternakan, pertanian tanaman pangan, pertambangan dan lain-lain. Pemanfaatan sumberdaya alam tersebut masih dikelola secara tradisional belum menggunakan teknologi tepat guna. Melihat kondisi ini diperlukan pengenalan teknologi tepat guna sehingga pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara optimal.

Kondisi daerah rawan bencana yang sering terdapat di Kabupaten Pasaman berupa daerah kawasan tanah longsor, kawasan rawan banjir dan kawasan lahan kritis. Kawasan rawan banjir sering terjadi pada Kecamatan Panti, Mapat Tunggul Selatan, Bonjol, Padang Gelugur, Rao Utara dan Rao Selatan, kawasan rawan longsor banyak terjadi di daerah Kecamatan Bonjol, Lubuk Sikaping Panti, Rao, Dua Koto, Mapat Tunggul, Rao Selatan dan Tigo Nagari, sedangkan kawasan lahan kritis banyak terdapat pada daerah kecamatan Panti, Rao, Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan, Rao Utara dan Rao Selatan.

4.7.6.2 Sumber Daya Manusia

Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal di Kabupaten Pasaman mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah. Melihat kondisi ini perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan

masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan maupun keterampilan mengingat sumber daya manusia merupakan komponen terpenting dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek pendidikan dipahami melalui pentingnya Pasaman mewujudkan wajib belajar dengan prioritas program ditujukan untuk mengatasi persoalan putus sekolah sekaligus akses pada jenjang pendidikan sampai tingkat SLTA.

Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasaman juga masih rendah dari pada IPM Propinsi Sumatera Barat (72,23) yaitu 71,05. Tetapi IPM Kabupaten Pasaman tertinggi jika dibandingkan dengan IPM pada 8 Kabupaten Tertinggal lainnya.

4.7.6.3 Sarana dan Prasarana

Beberapa Kecamatan, Nagari dan Jorong di Kabupaten Pasaman bahkan Ibu Kota Kecamatan masih belum bisa dilalui kendaraan roda empat. Ketelisoliran Kecamatan, Nagari, Jorong adalah faktor utama penyebab ketertinggalan, antara lain yang paling parah adalah semua jorong dan nagari di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Dua Koto dan beberapa jorong tersebar disemua kecamatan belum dapat dilalui sarana transportasi.

Dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman yang dapat menikmati jasa telekomunikasi dan komunikasi baru sebagian kecil Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan panti dan Kecamatan Padang

Sumberdaya alam seperti lahan subur untuk pertanian/perkebunan, laut dan sungai untuk perikanan tangkap maupun budidaya, serta aneka jenis bahan galian/tambang jelas ada di Kabupaten Pasaman Barat. Namun tingkat pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan kecuali pemanfaatan lahan untuk perkebunan khususnya sawit, coklat dan jagung. Ini disebabkan karena masih kurangnya minat kesadaran dari masyarakat setempat untuk mengolah Sumberdaya alam yang ada.

Daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana umumnya terdapat pada daerah aliran sungai rawan banjir, perbukitan rawan longsor dan daerah pesisir/pantai yang rawan ombak besar dan tsunami.

Sungai-sungai yang berpotensi mendatangkan bencana banjir setiap tahun adalah Batang Batahan, Batang Sikabau, Batang Pasaman, Batang Timah dan Batang Masang. Khusus untuk Batang Pasaman, setiap musim hujan selalu mendatangkan bencana banjir yang mengakibatkan terputusnya hubungan darat ke kecamatan Gunung tuleh, Sungai Aur, Lembah Melintang, Koto Balingka, Sungai Beremas dan Ranah Batahan.

Untuk daerah perbukitan, lokasi rawan bencana umumnya berada di kecamatan Talamau, Gunung Tuleh, Sungai Aur, Lembah Melintang dan Ranah Batahan. Sedangkan daerah pesisir / pantai rawan bencana terdapat di kecamatan Sungai Beremas, Koto Balingka, Sasak Ranah Pasisie dan Kecamatan Kinali. Daerah pesisir/pantai Kabupaten Pasaman Barat ini berada di pantai barat Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia (Samudera Hindia) dan sekaligus merupakan daerah rawan gempa (*Sircum Mediterania*)

Gelugur, tetapi hal ini juga belum dapat menampung komunikasi pada daerah/wilayah yang tertinggal di Kabupaten Pasaman.

Pada prasarana listrik yaitu belum adanya sarana dan prasarana penerangan listrik di daerah tertinggal yang tersebar di Kabupaten Pasaman mengakibatkan daerah-daerah yang sudah tertinggal menjadi lebih tertinggal lagi, sehingga berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Sarana Pendidikan pada daerah tertinggal di Kabupaten Pasaman masih jauh dari yang diharapkan, mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta mutu pendidikan yang menimbulkan banyaknya angka putus sekolah dan tingginya angka buta huruf pada masyarakat setempat.

4.7.7 Kabupaten Pasaman Barat

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa permasalahan pada Kabupaten Pasaman Barat, penjelasannya adalah sebagai berikut :

4.7.7.1 Sumber Daya Alam

Secara geografis, umumnya daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena yang letaknya jauh di pedalaman, daerah perbukitan/pegunungan sehingga sangat sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun komunikasi.

Secara keseluruhan ada 65 desa/jorong yang tertinggal di Kabupaten Pasaman Barat. Daerah ini jauh dari pusat pemerintahan dan sulit dijangkau dengan transportasi dan telekomunikasi baik dari Kecamatan maupun Kabupaten.

yang memanjang dari Aceh (utara Pulau Sumatera) sampai ke Lampung/Selat Sunda (selatan Pulau Sumatera). Pada kawasan pantai, masyarakat selalu dihantui akan terjadinya abrasi pantai dimana abrasi ini akan mengikis daerah pantai yang dihuni oleh penduduk.

4.7.7.2 Sumber Daya Manusia

Secara umum tingkat pendidikan formal masyarakat Kabupaten Pasaman Barat masih relatif rendah, dimana 45,93% tidak tamat SD, 45,67 % tidak menamatkan SLTP dan 8,40% juga tidak tamat SLTA. Diperkirakan 80% yang tidak menamatkan pendidikan formal berada di daerah tertinggal. Jika dilihat dari ilmu pengetahuan, maka Kabupaten Pasaman Barat masih sangat jauh tertinggal dan jauh dari yang diharapkan sehingga kemampuan untuk mengolah sumber daya alam sangat sulit serta potensi belum bisa dioptimalkan dimana pada akhirnya daerah tidak bisa meningkatkan pendapatan. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang masih sangat terbatas, dimana 87 % sarana prasarana pendidikan sekolah rusak berat, dan rata-rata di daerah tertinggal hanya memiliki Sekolah Dasar (SD), untuk Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) jauh dari tempat tinggal mereka. Disamping itu juga masih kurangnya pembinaan dari instansi/dinas sektoral daerah terpencil. Jika dilihat dari kesehatan, dimana hampir seluruh daerah tertinggal belum dapat menikmati air bersih dan fasilitas lainnya, sehingga akan terjadi rawan bencana seperti, yang mengakibatkan kesehatan tidak terjamin, gizi buruk, serta produktifitas menurun sehingga ekonomi tidak dapat terpenuhi, inilah yang terjadi di kawasan daerah tertinggal.

4.7.7.3 Sarana dan Prasarana

Desa/Jorong yang mengalami ketertinggalan di Kabupaten Pasaman Barat selalu ditandai dengan sangat minimnya sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas masyarakat sehari-hari, bahkan masih banyak komunitas penduduk yang harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk sampai di pasar atau aktifitas ekonomi sosial lainnya, sekolah maupun puskesmas. Jika dilihat dari Prasarana yang ada, Kabupaten Pasaman Barat masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Ini disebabkan karena masih adanya jorong/desa yang belum bisa dijangkau oleh kendaraan roda empat yang tersebar di seluruh kecamatan baik di wilayah perbukitan maupun wilayah pesisir, selain itu listrik, sarana air bersih yang pada umumnya di daerah tertinggal belum ada. Pembangunan Nasional yang sudah berlangsung selama ini, belum mampu membuka daerah-daerah dimaksud dari keterisoliran dan ketertinggalan seperti dalam hal ini daerah kawasan pesisir pantai dan daerah kawasan perbukitan.

4.7.8 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa permasalahan pada Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, penjelasannya adalah sebagai berikut:

4.7.8.1 Sumber Daya Alam

Kondisi geografis Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang berbukit dan bergelombang serta terpencar-pencar menyebabkan pelaksanaan pembangunan tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Dengan kondisi ini pelayanan kesehatan,

pendidikan, penyediaan sarana perekonomian belum mampu menjangkau seluruh masyarakat secara memadai. Hal ini menyebabkan sebagian daerah di Kabupaten ini mengalami perkembangan yang agak lambat dibandingkan dengan daerah lain. Disamping itu posisi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung juga jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di Sumatera Barat menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat.

4.7.8.2 Sumber Daya Manusia

Pada umumnya terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat relative masih rendah. Hal ini tergambar dalam Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tahun 2007 yaitu 69,29 dimana kondisinya masih dibawah IPM Propinsi Sumatera Barat yaitu 72,23. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Kondisi geografis daerah yang kurang menguntungkan.
- c. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas anggota keluarga.
- d. Masih relatif rendahnya pendapatan keluarga sehingga kepala keluarga cenderung mendorong anggota keluarga untuk bekerja atau membantu kepala keluarga dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.

Indikator lain yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah derajat kesehatan masyarakat. Keadaan kesehatan masyarakat di indikasikan oleh : (a). angka kematian bayi (b). angka kematian Balita (c). angka kematian ibu

melahirkan (d). angka kematian kasar (e). berat badan lahir rendah dan (g). usia harapan hidup.

Berdasarkan keenam indikator tersebut diatas, pemeliharaan kesehatan Balita merupakan aspek yang sangat penting. Kelalaian dalam pemeliharaan Balita cenderung akan mengakibatkan munculnya sumber daya manusia dengan kualitas yang relatif rendah. Keadaan lainnya dilihatkan oleh rumah tangga yang pernah memberikan imunisasi terhadap Balitanya.

Keadaan lainnya yang perlu mendapat perhatian dan diperkirakan masih menghadapi permasalahan adalah bagaimana kemampuan rumah tangga dalam menyusui bayi yang diikuti dengan pemberian makanan tambahan. Melihat performa ekonomi sebagian masyarakat diperkirakan cukup banyak rumah tangga yang tidak memiliki kemampuan untuk menyusui bayinya dengan diikuti pemberian makanan tambahan.

Disamping itu masalah yang dihadapi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung adalah masih tingginya angka kemiskinan yaitu 37.654 orang atau 18,61 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang berjumlah 202.275 jiwa.

4.7.8.3 Sarana dan Prasarana

Secara umum infrastruktur yang tersedia di kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dirasakan masih sangat kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sulitnya memenuhi kebutuhan akan infrastruktur disebabkan oleh keterbatasan dana pembangunan dan luasnya wilayah dengan topografi berbukit dan bergelombang. Disamping itu terdapat kantong-kantong

pemukiman yang terpencil dan terisolir. Untuk mengakses dan menghubungkan kantong-kantong pemukiman tersebut diperlukan prasarana jalan dan jembatan yang cukup panjang dan mahal.

4.7.9 Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa permasalahan pada Kabupaten Kepulauan Mentawai, penjelasannya adalah sebagai berikut :

4.7.9.1 Sumber Daya Alam

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari beberapa pulau yang terpencar, sehingga sangat dipengaruhi oleh cuaca dan gelombang laut dan kurangnya transportasi yang menghubungkan antar pulau khususnya kapal barang (cargo), juga masih terbatasnya sarana dan Prasarana telekomunikasi .

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, seperti perikanan, kehutanan dan perkebunan, peternakan, pertanian tanaman pangan, dan lain-lain. Pemanfaatan sumberdaya alam tersebut masih dikelola secara tradisional belum menggunakan teknologi tepat guna.

Derah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah daerah yang rawan bencana terutama gempa. Berdasarkan pembagian wilayah gempa menurut SNI 03-1726-2002 daerah Kab. Kep. Mentawai termasuk dalam wilayah 6 dengan kegempaan paling tinggi.

Disamping itu dalam pengadaan bahan galian seperti batu kali, pasir sungai dan kerikil, masih mendatangkan dari Padang sehingga membutuhkan biaya transportasi yang sangat tinggi.

4.7.9.2 Sumber Daya Manusia

Pada umumnya terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat relative masih rendah. Hal ini tergambar dalam Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2007 yaitu 67,72 dimana kondisinya masih dibawah IPM Propinsi Sumatera Barat yaitu 72,23. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan contohnya tahun 2008 tidak ada satu pun Perguruan tinggi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Kondisi geografis daerah yang kurang menguntungkan.
- c. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya Pendidikan dalam meningkatkan kualitas anggota keluarga.
- d. Masih relatif rendahnya pendapatan keluarga sehingga kepala keluarga cenderung mendorong anggota keluarga untuk bekerja atau membantu kepala keluarga dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.

4.7.9.3 Sarana dan Prasarana

Permasalahan pada bidang sarana dan prasarana adalah kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur untuk Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan dan Prasarana Jalan -Jembatan dan air bersih . Contohnya untuk bidang pendidikan, sampai tahun 2008 belum ada sarana pendidikan pada perguruan tinggi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan untuk bidang kesehatan dimana terbatasnya

BAB V

PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan dari visi dan misi 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat dan kebijakan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat. Serta penentuan sektor basis atau sektor unggulan pada 9 Kabupaten Tertinggal dengan menggunakan Metode *Location Quotient* (LQ). Dari hasil perhitungan metode LQ maka akan teridentifikasi apa – apa saja sektor basis atau sektor unggulan pada Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat. Setelah itu pada bagian ini juga dilakukan analisis SWOT untuk menentukan kebijakan pembangunan yang akan datang.

5.1.1 Visi dan Misi 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat

Pada bagian ini akan dijelaskan visi dan misi 9 Kabupaten Tertinggal, berikut adalah penjabarannya.

5.1.1.1 Kabupaten Padang Pariaman

a. Visi

Visi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera berlandaskan hukum, agama, adat dan budaya melalui pemerintahan yang baik dan berwibawa”

tenaga medis, contohnya untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya tersedia 1 RSU, 7 puskesmas dan tidak satu pun dokter spesialis.

Pada infrastruktur jalan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang paling tertinggal diantara 9 Kabupaten Tertinggal di Propinsi Sumatera Barat, hal ini terlihat dari kondisi jalan yang rusak berat yaitu 400,70 Km atau 76,04% dari seluruh panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai (522,40 Km). Dan sebanyak 63,70 Km rusak ringan. Jadi hanya 58 Km jalan yang baik pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dari sumber data Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2008.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi dari Kabupaten Padang Pariaman adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan.
3. Memotivasi masyarakat untuk mengamalkan norma agama, adat dan hukum dalam kehidupan masyarakat dan berbegara.
4. Mewjutkan pelayanan prima melalui peningkatan kinerja aparatur secara berkesinambungan.

5.1.1.2 Kabupaten Solok

a. Visi

Visi Kabupaten Solok tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya kepemimpinan, pemerintahan dan masyarakat
yang amanah, santun dan tegas menuju masyarakat madani
di Kabupaten Solok tahun 2010”**

b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi dari Kabupaten Solok adalah :

1. Membangun manajemen pemerintahan yang profesional.
2. Membangun masyarakat yang madani.
3. Membangun kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat.
4. Membangun suasana keterbukaan aspiratif dan partisipatif.
5. Membangun sinergitas dalam pemberdayaan masyarakat.
6. Membangun komitmen bersama dalam penegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen.
7. Membangun kualitas hubungan yang dinamis dengan perantau.

5.1.1.3 Kabupaten Solok Selatan

a. Visi

Visi Kabupaten Solok Selatan tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan yang harmonis (yang mempunyai harkat dan martabat, bermoral aman peduli dan sejahtera, sesuai dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) ”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi dari Kabupaten Solok Selatan adalah :

Menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dan percaya diri untuk bangkit mengantarkan Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu daerah otonom yang harmonis, sejajar dan mampu berkompetisi dengan daerah maju lainnya di Sumatera Barat pada tahun 2010 dalam satu tekad dan semangat menaruko bersama.

5.1.1.4 Kabupaten Dharmasraya

a. Visi

Visi Kabupaten Dharmasraya tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

“Menjadi kabupaten yang maju dalam keseimbangan”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi dari Kabupaten Dharmasraya adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan penuh pengabdian yang berbasis *good governance, good goverment, dan clean governance.*
2. Mewujudkan masyarakat yang produktif dan memiliki ekonomi yang tangguh.

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat dalam lingkungan yang bersih aman dan nyaman.
4. Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan menguasai teknologi.
5. Mewujudkan masyarakat religius yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun penuh kedamaian, berbudaya serta didukung oleh supremasi hukum dan stabilitas politik yang handal.

5.1.1.5 Kabupaten Pesisir Selatan

a. Visi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang sejahtera”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi dari Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Menegakkan supremasi hukum dan HAM, menjalankan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian lokal dan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi dengan megoptimalkan pengembangan kawasan ekonomi secara terpadu.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan ketahanan budaya.
4. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana daerah, ekonomi, agama dan sosial budaya.

5.1.1.6 Kabupaten Pasaman

a. Visi

Visi Kabupaten Pasaman tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada
melalui pemerintahan yang baik”**

b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi dari Kabupaten Pasaman adalah:

1. Melepaskan daerah tertinggal dan keterisolasian kawasan dengan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan.
2. Membebaskan ketertinggalan dari sarana telekomunikasi.
3. Mengembangkan ekonomi lokal dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan di daerah setempat.
4. Mengembangkan usaha pertanian melalui revitalisasi teknologi pertanian.
5. Membina dan memberdayakan masyarakat terhadap akses kelembagaan ekonomi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi keluarga.

5.1.1.7 Kabupaten Pasaman Barat

a. Visi

Visi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada**

melalui pemerintahan yang baik”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi dari Kabupaten Pasaman adalah:

1. Melepaskan daerah tertinggal dan keterisolasian kawasan dengan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan.
2. Membebaskan ketertinggalan dari sarana telekomunikasi.
3. Mengembangkan ekonomi lokal dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan di daerah setempat.
4. Mengembangkan usaha pertanian melalui revitalisasi teknologi pertanian.
5. Membina dan memberdayakan masyarakat terhadap akses kelembagaan ekonomi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi keluarga.

5.1.1.8 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

a. Visi

Visi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat sijunjung yang maju, sejahtera, berbudaya dan religius dalam bingkai NKRI”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi dari Kabupaten Pasaman adalah:

1. Mewujudkan nagari sebagai basis pembangunan ekonomi, sosial, budaya masyarakat dan nagari sebagai kawasan pemukiman yang ideal.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa serta SDM Masyarakat Sijunjung.
4. Meningkatkan kemampuan manajemen Pemerintah Kabupaten.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum.
6. Mengoptimalkan peran masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan daerah.

5.1.1.9 Kabupaten Kepulauan Mentawai

a. Visi

Visi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berlandaskan kebersamaan”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi dari Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia derajat sosial bagi masyarakat.

2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan di tiga wilayah.
3. Mengembangkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan.
5. Membangun kerjasama kemitraan dengan seluruh stakeholder.
6. Mendorong berperan dan berfungsi lembaga – lembaga keagamaan dalam menciptakan kerukunan umat.
7. Meningkatkan pemahaman nilai – nilai budaya dan kearifan lokal.

5.1.2 Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal di Sumatera Barat

Berikut adalah beberapa kebijakan prioritas yang ditetapkan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan kebijakan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat yang mencakup kebijakan nasional, propinsi dan pemerintah daerah tertinggal di Sumatera Barat tahun 2008. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa arah kebijakan dari beberapa kebijakan pusat, propinsi dan daerah memiliki arah kebijakan yang sama, ini berarti dari tingkat pusat provinsi dan daerah memiliki tujuan yang sama dalam pembangunan daerah tertinggal :

5.1.2.1 Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal daerah tertinggal di Sumatera Barat yang dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal (sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kelembagaan) dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Berikut adalah arah kebijakan dan program – program sebagai implemetasi arah kebijakan

pengembangan ekonomi lokal.(Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,2007)

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan ekonomi lokal adalah (Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,2007):

1. Memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha di daerah tertinggal terhadap sumberdaya produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelestarian dan memberikan nilai tambah pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
2. Mengembangkan agroindustri yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan sistem kluster dengan pendekatan kewilayahan.
3. Menciptakan iklim usaha yang sehat, berdaya saing dan sekaligus meningkatkan sistem insentif dalam kebijakan investasi dan mendorong terciptanya distribusi nasional yang terpadu.
4. Mendorong percepatan pengembangan dan pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, dan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah tertinggal dan daerah terpencil.

b. Program

Berikut adalah beberapa program sebagai implementasi arah kebijakan pengembangan perekonomian lokal :

1. Penataan struktur industri, kegiatannya adalah mendorong terjadinya kemitraan industri penunjang dan industri terkait.

2. Pengembangan ekonomi lokal, kegiatannya adalah peningkatan peran koperasi di lokasi atau pada daerah tertinggal di Sumatera Barat.
3. Pengembangan agribisnis, kegiatannya adalah pengembangan jaringan irigasi pada kawasan agropolitan.
4. Pengembangan sumberdaya perikanan, kegiatannya adalah bantuan sarana perikanan tangkap di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Peningkatan ketahanan pangan, kegiatannya adalah pembinaan dan pengembangan ketersediaan dan penanganan daerah rawan pangan.
6. Pengembangan industri kecil dan menengah, kegiatannya adalah bantuan modal dan kredit dengan bunga ringan pada usaha kecil di daerah seperti makanan khas daerah melalui koperasi dan lembaga keuangan lainnya.

5.1.2.2 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal di Sumatera Barat dilaksanakan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha.

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat adalah (Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, 2007):

1. Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu serta merata di daerah tertinggal.

2. Peningkatan kemampuan dan kewirausahaan petani/nelayan dalam menghasilkan komoditas sehingga tercipta perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendataan keluarga miskin di daerah/nagari tertinggal.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan peningkatan peranan pemuda dalam pembangunan di daerah tertinggal.
4. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan dan mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.
5. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, dan mengefektifkan sumberdaya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.
6. Mengembangkan sistem manajemen dan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup disemua tingkatan pemerintah yang melibatkan masyarakat sebagai kontrol sosial sehingga memberikan nilai tambah secara berkelanjutan terhadap pengembangan ekonomi lokal.
7. Membangun sistem perencanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, serta pulau-pulau kecil yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat, melalui kemitraan pemerintah dan swasta.
8. Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir, meningkatkan keselamatan kerja, dan meminimalkan risiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

b. Program

Berikut adalah beberapa program sebagai implementasi arah kebijakan pemberdayaan masyarakat :

1. Keluarga berencana, kegiatannya adalah menggerakkan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, termasuk ketersediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin di daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan di kabupaten/kota.
2. Pendidikan anak usia dini (paud), kegiatannya adalah pemberian bantuan alat permainan edukatif pada pendidikan anak usia dini (TK).
3. Wajib belajar 9 tahun, kegiatannya adalah beasiswa anak keluarga miskin yang kurang mampu pada tingkat SMP dan MTS.
4. Upaya kesehatan masyarakat, kegiatannya adalah peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat.
5. Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya, kegiatannya adalah pelatihan/bimbingan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin.
6. Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda, kegiatannya adalah pembinaan bulan bhakti gotong royong.
7. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, kegiatannya adalah Bimbingan dan pembinaan keluarga miskin di bidang industri kecil rumah tangga.

5.1.2.3 Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dan masyarakat di daerah tertinggal di Sumatera Barat. Peningkatan kapasitas kelembagaan ini untuk memberikan dukungan pada kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan keterisolasian daerah adalah (Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, 2007) :

1. Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis dalam suatu “sistem wilayah pengembangan ekonomi melalui peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang mobilisasi masyarakat desa.
2. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya.
3. Menyelenggarakan pendidikan alternatif di wilayah konflik dan bencana alam yang diikuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak.
4. Menyediakan prasarana dan sarana kesehatan masyarakat yang berorientasi pada masyarakat tertinggal dengan membangun penyediaan air melalui pendekatan vegetatif dalam rangka konservasi sumber-sumber air.

b. Program

Program – program sebagai implementasi arah kebijakan pengurangan keterisolasian daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan wilayah perbatasan, dengan kegiatannya adalah Percepatan pembangunan wilayah perbatasan.
2. Perencanaan tata ruang, dengan kegiatannya adalah Penyusunan rencana tata ruang nagari.
3. Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas perhubungan, dengan kegiatannya adalah Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten Pasaman.
4. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya, dengan kegiatannya adalah Pembangunan irigasi baru pada kawasan pertanian Kabupaten baru yaitu Dharmasraya.
5. Pembangunan prasarana dan sarana daerah tertinggal, dengan kegiatannya adalah pembangunan jalan dan jembatan pada kawasan daerah tertinggal, perbaikan jalan – jalan yang rusak serta perbaikan prasarana sekolah.
6. Penyediaan dan pengelolaan air bersih, dengan kegiatannya adalah pengadaan prasarana air bersih pada Kabupaten Padang Pariaman.

5.1.2.4 Kebijakan Penanganan Karakteristik Khusus Daerah

Kebijakan penanganan karakteristik khusus daerah yang berkaitan dengan pengembangan daerah perbatasan sebagai beranda depan daerah yang akan dilakukan melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber

daya alam dan pengembangan komoditi unggulan dan yang berkaitan dengan percepatan rehabilitasi dan pemulihan daerah-daerah pasca bencana alam dan pasca konflik serta mitigasi bencana.

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan penanganan karakteristik daerah adalah (Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, 2007) :

1. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
2. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan, meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek dan memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana serta pengelolaan angkutan sungai.
3. Mengembangkan wilayah – wilayah perbatasan dengan mengubah kebijakan pembangunan yang selama ini *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dengan daerah tetangga.
4. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir menggunakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.

b. Program

Program-program sebagai implementasi arah kebijakan penanganan karakteristik khusus daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian Banjir, Bahaya Longsor, Gunung Berapi, Gempa Bumi, Angin Puting Beliung dan Daerah Pasca Bencana. dengan kegiatannya adalah rehabilitasi dan bantuan stimulan pembangunan rumah dalam rangka penanganan bencana alam dan penanganan rumah tidak layak huni.
2. Pemberdayaan masyarakat komunitas perumahan, dengan kegiatannya adalah Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pada permukiman kumuh.
3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan kegiatannya adalah penetapan tapal batas daerah tertinggal.

5.1.3 Hasil Perhitungan Metode LQ (*Location Quetiont*)

Dalam usaha pembangunan daerah tertinggal perlu adanya pengembangan yang lebih terspesialisasi. Penetapan ini dapat dilakukan dengan pendekatan LQ.

Sektor Basis adalah sektor yang mempunyai koefisien LQ lebih dari satu ($LQ > 1$), dan sektor Non Basis adalah yang mempunyai koefisien LQ kurang dari satu ($LQ < 1$).

Tabel 5.1 berikut ini adalah hasil perhitungan LQ rata – rata tahun 2002 – 2008 pada 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku masing – masing Kabupaten Tahun 2002 – 2008.

Tabel 5.1

Hasil Perhitungan LQ Rata – rata tahun 2002 – 2008

Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat

No	Kabupaten	Sektor 1	Sektor 2	Sektor 3	Sektor 4	Sektor 5	Sektor 6	Sektor 7	Sektor 8	Sektor 9
1.	Padang Pariaman	1,15	1,23	0,89	1,20	1,00	0,72	0,93	0,49	1,16
2.	Solok	1,79	1,04	0,57	0,39	1,12	0,76	0,75	0,36	0,80
3.	Solok Selatan	1,61	1,92	0,86	0,67	1,32	0,96	0,47	0,44	0,59
4.	Pesisir Selatan	1,38	0,47	1,05	0,51	0,84	1,17	0,22	0,78	1,13
5.	Dharmasraya	1,57	1,30	0,50	0,90	2,21	0,66	0,49	0,77	0,92
6.	Pasaman	2,14	0,66	0,36	0,31	0,58	0,66	0,29	0,78	1,05
7.	Pasaman Barat	1,28	0,29	1,91	0,12	0,57	1,40	0,26	0,37	0,64
8.	Swl/Sijunjung	1,16	4,34	0,36	0,96	2,04	0,62	0,55	0,72	1,05
9.	Mentawai	2,21	0,14	0,67	0,11	0,60	1,15	0,45	0,22	0,36

Sumber : Data diolah (dari data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 9 Kabupaten Tertinggal dan Propinsi Sumatera Barat)

Keterangan

Sektor 1: Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan), Sektor 2: Pertambangan dan Penggalian, Sektor 3: Industri Pengolahan, Sektor 4: Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor 5: Bangunan, Sektor 6: Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor 7: Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor 8: Keuangan, Persewaan dan Jasa – jasa perusahaan, Sektor 9: Jasa – jasa.

Informasi diatas diolah dengan menggunakan Metode Location Quetiont (LQ), informasi tersebut diperoleh dengan membandingkan perannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan antar industri sejenis dalam perekonomian daerah atau propinsi. Berikut adalah rumus metode LQ seperti yang dijelaskan pada BAB III:

$$LQ_{ij} = \frac{Y_{ij} / \sum_{i=1}^n Y_{ij}}{\sum_{j=1}^m Y_{ij} / \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m Y_{ij}}$$

LQ = Location Quotient / Koefisien Lokasi

Y_{ij} = Nilai tambah dari sektor i di satu wilayah (Kabupaten)

$\sum_{j=1}^m Y_{ij}$ = Nilai tambah dari sektor i di satu wilayah (propinsi)

$\sum_{i=1}^n Y_{ij}$ = Total Output (PDRB) seluruh sektor di satu wilayah (sub wilayah/kabupaten)

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m Y_{ij}$ = Total Output (PDRB) seluruh sektor secara regional (propinsi)

i = 1,2,3,... n (sektor)

j = 1,2,3,... m (sektor)

Jika:

$LQ > 1$ artinya sektor i merupakan sektor unggulan/basis

$LQ < 1$ artinya sektor i merupakan sektor non basis.

Hasil perhitungan pada Tabel 5.1 diatas diperoleh dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Daerah Tertinggal dan Propinsi Sumatera Barat, disini untuk contoh perhitungan kita ambil Kabupaten Dharmasraya, berikut beberapa data dari BPS dan Bappeda yang diketahui, Kabupaten Padang Pariaman memiliki PDRB untuk sektor pertanian: 1.269.375,23. PDRB ADHB: 5.128.388,03. Dan Propinsi Sumatera Barat memiliki PDRB untuk sektor pertanian : 17.272.739,30 dan PDRB ADHB : 70.614.210,04. Berikut adalah contoh perhitungan LQ

LQ sektor pertanian : $\frac{1.269.375,23}{17.272.739,30}$
 $\frac{5.128.388,03}{70.614.210,04}$

LQ sektor pertanian : **1,01** (sesuai dengan hasil perhitungan LQ Kabupaten Padang Pariaman Lampiran 3.1)

Setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan contoh perhitungan diatas maka diperoleh perhitungan Metode LQ dari 9 Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat pada Lampiran. Tabel 5.1 dirangkum dari hasil Lampiran. tetapi yang dimasukkan hanya perhitungan rata – ratanya. Perhitungan rata – rata ini dari 7 tahun yaitu 2002 sampai dengan 2008.

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas diketahui bahwa 9 Kabupaten Tertinggal memiliki sektor basis pertanian. Yang paling tinggi nilai LQ nya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, ini karena daerahnya merupakan kawasan hutan. Dari data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2008 luas hutannya adalah 601.676,18 Hektar, sekitar 45,51 persennya merupakan hutan produksi yang membuka peluang untuk memanfaatkan potensi yang ada untuk pembangunan daerah, sedangkan yang digunakan sebagai hutan lindung memiliki persentase terecil yaitu hanya mencapai 0,53 persen atau seluas 3.181,95 Hektar.

Berikutnya sektor pertambangan dan penggalian, ada 5 Kabupaten yang memiliki sektor basis tersebut, didominasi oleh Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dengan nilai LQ : 4,34. Ini karena adanya bahan tambang golongan A dan Golongan B di daerah tersebut. Untuk bahan tambang golongan A yaitu batubara yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tanjung Gadang, dengan produksinya pada tahun 2008 adalah 243.133 Ton. selanjutnya bahan tambang golongan B yaitu emas yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Lubuak Tarok dan Sumpur Kudus. Dan bahan tambang golongan C seperti

marmer, dolomite, oker, granit, andesit, kaolin dan sirtukil tersebar di seluruh kecamatan.

Sektor berikutnya yaitu sektor industri pengolahan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat ini karena di daerah tersebut terdapat perkebunan sawit dan coklat yang luas. Contoh industri pengolahan yang berada pada Kabupaten Padang Pariaman adalah Coco Mas yaitu industri pengolahan kelapa. Dimana Kabupaten Padang Pariaman merupakan penghasil kelapa terbesar di Sumatera Barat dengan produksi pada tahun 2006 sebesar 32.038,56 Ton dan meningkat menjadi 39.806 di tahun 2008.

Berikutnya sektor listrik, gas dan air bersih hanya Kabupaten Padang Pariaman memiliki sektor basis tersebut. Selanjutnya untuk sektor basis bangunan yang paling tinggi adalah Kabupaten Dharmasraya dengan nilai LQ : 2,21. Hal ini karena banyaknya kegiatan pembangunan di Dharmasraya seperti pembangunan kantor – kantor, perumahan dan sarana dan prasarana lainnya. Selanjutnya untuk sektor perdagangan hotel dan restoran yang paling tinggi adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai LQ : 1,17 ini melambangkan tingginya peminat pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dan juga di Pesisir Selatan adanya olah raga para layang yang mengundang minat wisatawan dalam dan luar negeri. Untuk sektor pengangkutan, hotel dan komunikasi yang memiliki tidak satu pun diantara 9 Kabupaten Tertinggal yang memiliki sektor basis pengangkutan dan komunikasi, hal ini melambangkan lemahnya aktivitas industri, pengangkutan dan komunikasi pada daerah ini. Untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa – jasa perusahaan hanya Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang sektor basis tersebut, hal ini karena letaknya pada kawasan lintas sumatera. Terakhir untuk sektor jasa –

jasa yang paling tinggi adalah Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai LQ : 1,16. Ini karena terdapatnya Bandara pada Kabupaten Padang Pariaman sehingga mendorong berkembangnya sektor jasa – jasa seperti transportasi. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 diatas kalau yang memiliki nilai $LQ > 1$ berarti ini merupakan sektor basis. Sektor Basis dimaksud adalah sektor yang mempunyai kegiatan mengekspor barang – barang dan jasa – jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, sedangkan Sektor Non Basis adalah sektor yang mempunyai kegiatan menyediakan barang – barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam batas perekonomian daerah tersebut.

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa sektor basis diatas, yang seharusnya dikonsentrasikan untuk dikembangkan pada 9 Kabupaten Tertinggal, karena kemajuan dan kemunduran sektor ini akan mempengaruhi terhadap perekonomian daerah tersebut dan sektor – sektor yang lain. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah/ Kabupaten Tertinggal tersebut membuat kebijakan dan program – program pembangunan agar lebih memprioritaskan pada pengembangan sektor basis sesuai perhitungan diatas. Disamping itu peningkatan aktifitas sektor basis dalam daerah tertinggal tersebut akan menambah pendapatan ke dalam daerah tersebut, sehingga peningkatan pendapatan tersebut akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang dan jasa pada daerah tersebut.

5.1.4 Hasil Analisis SWOT

Berikut Analisis SWOT yang dibagi menjadi empat bagian yaitu Bidang Perekonomian, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Kelembagaan Dan Bidang Sarana Dan Prasarana.

Cara memasukkan informasi ini berdasarkan logika dan karakteristik daerah dan permasalahan daerah dengan memperhatikan apa – apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan penjelasan pada BAB II. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal/Internal Faktor Analisis SWOT (IFAS) ini kita peroleh datanya dari kondisi dan permasalahan pada daerah tertinggal. Peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal/Eksternal Faktor Analisis SWOT (EFAS) yang datanya kita peroleh dari faktor – faktor luar daerah seperti bantuan daerah lainnya dan kondisi ekonomi makro. Selanjutnya setelah dilakukan analisis kekuatan dan lainnya maka dari data ini disusunlah strategi pembangunan yaitu

Strategi SO, juga disebut sebagai strategi agresif dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut peluang yang sebesar-besarnya.

Strategi ST, juga disebut sebagai strategi diversifikasi tindakan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

Strategi WO, juga disebut sebagai strategi rasionalisasi ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

Strategi ST, juga disebut strategi defensif yang berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Berikut adalah hasil analisis SWOT dari empat bagian yang dijelaskan diatas :

5.1.4.1 Bidang Perekonomian

Tabel 5.2

Analisis SWOT Bidang Perekonomian

<div><div>IFAS</div><div>EFAS</div></div>	<i>STRENGTHS (S)</i>	<i>WEAKNESS (W)</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Potensi Sumber Daya Alam• Sektor – sektor basis pada masing – masing daerah tertinggal• Usaha Kecil dan Menengah yang telah ada• Pertumbuhan LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	<ul style="list-style-type: none">• Pengolahan yang masih tradisional• Ketersediaan lembaga keuangan mikro dan perbankan dan investasi• Tenaga penyuluh lapangan yang terbatas
<i>OPPORTUNITIES (O)</i>	<i>STRATEGI SO</i>	<i>STRATEGI WO</i>
<ul style="list-style-type: none">• Dampak pertumbuhan dan pembangunan wilayah sekitar• Peranan investor pemerintah daerah, luar daerah atau asing terhadap perekonomian daerah• Permintaan daerah lain atau provinsi lain pada daerah yang dekat dengan daerah perbatasan	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi potensi ekonomi dan sektor basis sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat• Berdayakan UKMM melalui program pelatihan dan investasi• Optimalisasi produksi pangan dan komoditi yang permintaannya tinggi dari daerah dan propinsi lain	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan dan penyuluhan tentang penyaluran kredit dengan bunga ringan• Optimalisasi potensi ekonomi dengan teknologi tepat guna melalui investasi dan pembangunan pusat perekonomian baru• Berdayakan masyarakat yang akan mengembangkan usahanya melalui investasi pemerintah daerah dan asing
<i>THREATS (T)</i>	<i>STRATEGI ST</i>	<i>STRATEGI WT</i>
<ul style="list-style-type: none">• Dampak kenaikan harga BBM• Kerusakan lingkungan dan bencana alam• Pelaku ekonomi dari daerah/propinsi lain yang akan memasuki pasar	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi produksi pangan dasar untuk kebutuhan dalam daerah dan tingkatkan kesejahteraan petani melalui bantuan bibit atau pupuk.• Berdayakan petugas penyuluh lapangan untuk peningkatan kualitas produksi komoditi unggulan dengan pelibatan masyarakat daerah sekitar dan juga promosi investasi ke luar daerah dan negeri	<ul style="list-style-type: none">• Pendirian industri mandiri untuk pengolahan komoditi unggulan daerah melalui modal dan investasi pemerintah dan koordinasi swasta• Pengembangan potensi ekonomi yang melibatkan masyarakat pada daerah tertinggal

Sumber : Hasil Analisis

Dari hasil analisis diatas dapat kita ditentukan strategi pada bidang perekonomian, selanjutnya dapat disusun kebijakan (program dan kegiatan) untuk bidang perekonomian berdasarkan hasil Analisis Swot dan Perhitungan LQ diatas.

5.1.4.2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 5.3

Analisis SWOT Bidang Pemberdayaan Masyarakat

<div> <div>IFAS</div> <div>EFAS</div> </div>	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan tenaga kerja Potensi Sumber Daya Alam Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan Putra dan putri asli daerah yang berprestasi Pengelolaan air bersih dan sarana kesehatan yang mulai disebar 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas tenaga kerja masih rendah Pengelolaan Sumber Daya Alam yang masih tradisional Angka kemiskinan dan serta biaya pendidikan. Keterbatasan jangkaun air bersih, listrik dan sarana kesehatan pada daerah terisolir
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ul style="list-style-type: none"> Masuknya tenaga kerja terdidik Kemajuan teknologi Staf pengajar pada universitas negeri yang berasal dari daerah Investasi pada bidang pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Industri/lapangan kerja baru Pendirian perguruan tinggi atas kerjasama pemerintah dan perguruan tinggi negeri Optimalisasi pembangunan sarana dan prasana sesuai usulan masyarakat setempat Otimalisasi kualitas kehidupan beragama dan budaya pada daerah tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja Beasiswa bagi yang berprestasi dan masyarkat miskin Peningkatan kesejahteraan guru/staf pengajar melalui pemberian honor tambahan dan kredit bunga ringan Utamakan pembangunan prasarana umum pada daerah tertinggal untuk pemerataan pembangunan
THREATS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan tenaga kerja yang baru Pengaruh migrasi yang negatif Kestabilan politik, sosial dan ekonomi (Kenaikan BBM) Bencana alam, kerusakan lingkungan dan penyebaran penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan Bantuan untuk pendidikan dan kesehatan dari pemerintah Mengembangkan upaya kelestarian lingkungan dan keselamatan penduduk. 	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama pemerintah dengan swasta untuk lapangan kerja baru Pengenalan dan bantuan alat – alat pertanian dengan teknolgi Pemberian Raskin, Pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin Pemerataan pembangunan pada wilayah tertinggal

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka telah teridentifikasi strategi yang akan dilaksanakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dapat

disusun kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat (program dan kegiatan) yang prioritas sesuai dengan isu mendesak dan usulan masyarakat pada daerah tertinggal di Sumatera Barat.

5.1.4.3 Bidang Kelembagaan

Tabel 5.4
Analisis SWOT Bidang Kelembagaan

<div> <div>IFAS</div> <div>EFAS</div> </div>	STRENGTHS (S) <ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi yang sudah terbentuk • Komunikasi dan koordinasi • Kerjasama antar lembaga • Tersusunya tupoksi tiap dinas 	WEAKNESS (W) <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan Aparatur Pemda • Kesesuaian penempatan aparatur sesuai keahlian • Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dan Kerjasama daerah tertinggal dengan daerah dipusat pemerintahan kabupaten
	OPPORTUNITIES (O) <ul style="list-style-type: none"> • Penempatan SDM Aparatur yang diperbantukan dari luar daerah/kabupaten tertinggal • Kapasitas SDM yang diperbantukan dari luar daerah/kabupaten tertinggal 	STRATEGI SO <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peran dan fungsi lembaga daerah • Peningkatan kegiatan Petugas Penyuluh kelapangan dalam bidang pertanian, peternakan dan UKMM
	THREATS (T) <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi atau masyarakat provokator keamanan wilayah • Konflik tapal batas wilayah 	STRATEGI WT <ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di daerah • Tetapkan tapal batas wilayah sesuai kesepakatan daerah/Pemerintah Daerah
	STRATEGI ST <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pelayanan publik • Optimalkan kegiatan pembangunan pada daerah tertinggal 	STRATEGI WO <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah • Optimalisasi penempatan sesuai keahlian (The right man on the right job)

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka telah teridentifikasi strategi yang akan dilaksanakan untuk bidang kelembagaan. Selanjutnya dapat disusun kebijakan bidang kelembagaan (program dan kegiatan).

5.1.4.4 Bidang Sarana dan Prasarana

Tabel 5.5

Analisis SWOT Bidang Sarana dan Prasarana

<div><div>IFAS</div><div>EFAS</div></div>	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
	<ul style="list-style-type: none">• Sarana dan prasarana yang telah ada• Dukungan dan peran serta masyarakat akan pembangunan• Pendapatan Asli Daerah (PAD)• Potensi Sumber Daya Alam yang ada	<ul style="list-style-type: none">• Minimnya fasilitas umum seperti sekolah, jalan, rumah sakit, pasar dan perkantoran• Keterbatasan jangkauan air bersih, listrik dan juga perumahan masyarakat yang belum layak• Kawasan terisolir yang tidak bisa dilalui kendaraan
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ul style="list-style-type: none">• Privatisasi Pengelolaan• Dapat ikut sertanya investor swasta dalam pembangunan sarana dan prasana daerah tertinggal• Kontribusi bantuan pusat (DAK,DAU) dan Bantuan Propinsi.	<ul style="list-style-type: none">• Pemerataan pembangunan dengan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana umum pada daerah tertinggal sesuai usulan warga dengan ikut peran serta investor swasta serta privatisasi	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen perencanaan tata ruang pada daerah tertinggal tertinggal dan optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana umum : air, listrik dan jalan baru. Selain itu juga pembagunan serta berdayakan SDA dan SDM yang ada untuk kebutuhan daerah dan pertumbuhan ekonomi
THREATS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ul style="list-style-type: none">• Berkembangnya kawasan kumuh dan penyebaran penyakit• Bencana banjir, gempa, dan longsor• Pembangunan yang masih berlanjut pada pusat perekonomian/pemerintah daerah• Musim kemarau yang panjang berakibat pada sarana listrik, pengairan dan pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan prasarana perumahan dan sosial lainnya dengan menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa dan didirikan di daerah bebas banjir, Pemetaan daerah rawan bencana serta sosialisasi ke masyarakat, Optimalisasi program pengendalian banjir dan pengamanan pantai	<ul style="list-style-type: none">• Tingkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan swasta untuk optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal, Pembangunan irigasi pada kawasan pertanian untuk mengatasi kekeringan pada musim kemarau, Prioritaskan perencanaan pembangunan pada daerah tertinggal dan terisolir.

Sumber : Hasil Analisis

Dari hasil analisis diatas dapat kita ditentukan strategi pada bidang sarana dan prasarana, selanjutnya dapat disusun kebijakan (program dan kegiatan) untuk bidang sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik daerah prioritas pembangunan pada daerah tertinggal tersebut.

5.2 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil Analisis SWOT yang telah dilakukan diatas, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat. Selanjutnya strategi tersebut dibagi ke dalam 4 bidang kebijakan yaitu perekonomian, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, sarana dan prasarana. Kebijakan tersebut kemudian dirumuskan kembali dalam beberapa program – program dan kegiatan berdasarkan analisis diatas.

5.2.1 Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal

Berdasarkan hasil perhitungan Metode LQ dan Analisis SWOT diatas maka kebijakan pengembangan ekonomi lokal diarahkan untuk kemandirian akan kebutuhan pangan, optimalisasi produktifitas sektor basis/unggulan sesuai dengan sektor basis/unggulan pada hasil perhitungan LQ diatas, pemberdayaan UMKM daerah melalui pelatihan dan kemudahan kredit serta peningkatan kerjasama Pemerintah Kabupaten dalam investasi swasta maupun asing.

5.2.2 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Analisis SWOT diatas maka kebijakan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk pembangunan industri/lapangan pekerjaan baru dan pelatihan calon tenaga baru, peningkatan sumber daya manusia melalui

peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana sosial serta peningkatan kualitas hidup umat beragama.

5.2.3 Kebijakan Peningkatan Fungsi Kelembagaan

Berdasarkan Analisis SWOT diatas maka kebijakan peningkatan fungsi kelembagaan diarahkan untuk Optimalisasi peran dan fungsi pemerintah daerah, Peningkatan jumlah, fungsi, peran dari petugas penyuluh lapangan, Peningkatan pelayanan publik dan Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tertinggal.

5.2.4 Kebijakan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Daerah Tertinggal

Berdasarkan Analisis SWOT diatas maka kebijakan pengembangan sarana dan prasarana daerah tertinggal diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum masyarakat seperti jalan, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, perkantoran, MCK, perumahan masyarakat serta pusat perekonomian atau pasar. Disamping itu juga diarahkan pada optimalisasi pembangunan prasarana perumahan dan sosial lainnya dengan menggunakan bahan konstruksi tahan gempa dan dibangun diatas tanah bebas banjir.

Pada Lampiran 4 akan mengemukakan implikasi kebijakan dari analisis SWOT diatas yaitu bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan prasarana. Dimana implikasi berikut sesuai dengan strategi SO, WO, ST dan WT. Selanjutnya kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan isu dan masalah mendesak sesuai dengan program prioritas pembangunan. Untuk lebih jelasnya implikasi kebijakan yang terdiri dari program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 4.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka diperoleh beberapa kesimpulan berikut :

1. Faktor – faktor yang menyebabkan ketertinggalan pada Daerah Tertinggal di Sumatera Barat adalah faktor geografis, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kondisi pertumbuhan ekonomi yang lambat dan kemiskinan, sarana dan prasarana yang terbatas, daerah rawan bencana dan konflik sosial dan efek kebijakan pembangunan yang tidak tepat.
2. Permasalahan yang dihadapi pada daerah tertinggal di Sumatera Barat berdasarkan pembahasan pada BAB IV adalah masih banyaknya daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan yang sulit ditempuh dengan menggunakan kendaraan, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, sarana dan prasarana yang terbatas seperti pada Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Sendiri dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah seperti pada Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2007 yang memiliki IPM 67,72 yang berada dibawah IPM Propinsi Sumatera Barat tahun 2007 yaitu 72,23
3. Dengan menggunakan Metode LQ maka didapat beberapa sektor unggulan/basis sesuai dengan hasil perhitungan diatas, seperti pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki nilai LQ 1,15 untuk

sektor perdagangan, hotel dan restoran. Jadi untuk pengembangan perekonomian lokal dari sektor basis ini kebijakan yang diambil adalah peningkatan promosi dan investasi pada pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai

4. Berdasarkan Analisis SWOT berikut adalah Kebijakan yang diperlukan untuk membangun daerah tertinggal adalah Kebijakan pengembangan ekonomi lokal, Kebijakan pemberdayaan masyarakat, Kebijakan peningkatan fungsi kelembagaan dan Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana daerah tertinggal.

6.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran dari penulis :

1. Agar Pemerintah Propinsi dan Kabupaten yang termasuk kriteria tertinggal lebih mengarahkan prioritas pembangunannya pada kecamatan atau nagarinya yang relatif lebih tertinggal agar tercapainya pemerataan pembangunan.
2. Agar kebijakan pembangunan yang telah ditemukan dalam implikasi kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan pada daerah tertinggal seperti Kebijakan pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan fungsi kelembagaan dan pengembangan sarana dan prasarana, seperti peningkatan produksi beras melalui sistem SRI (*The System of Rice Intensification*) pada daerah tertinggal di Sumatera Barat.
3. Agar Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah yang bersangkutan serta stake holder terkait dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah

tertinggal berdasarkan potensi - potensi yang dimiliki daerah dan sektor basis.

4. Agar penelitian dilanjutkan dengan mengambil satu kabupaten/daerah tertinggal saja sebagai studi kasus, dari satu daerah saja maka dapat diperoleh data dari nagari atau sampai ke desa, sehingga dapat ditentukan pada daerah tersebut kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan potensi daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

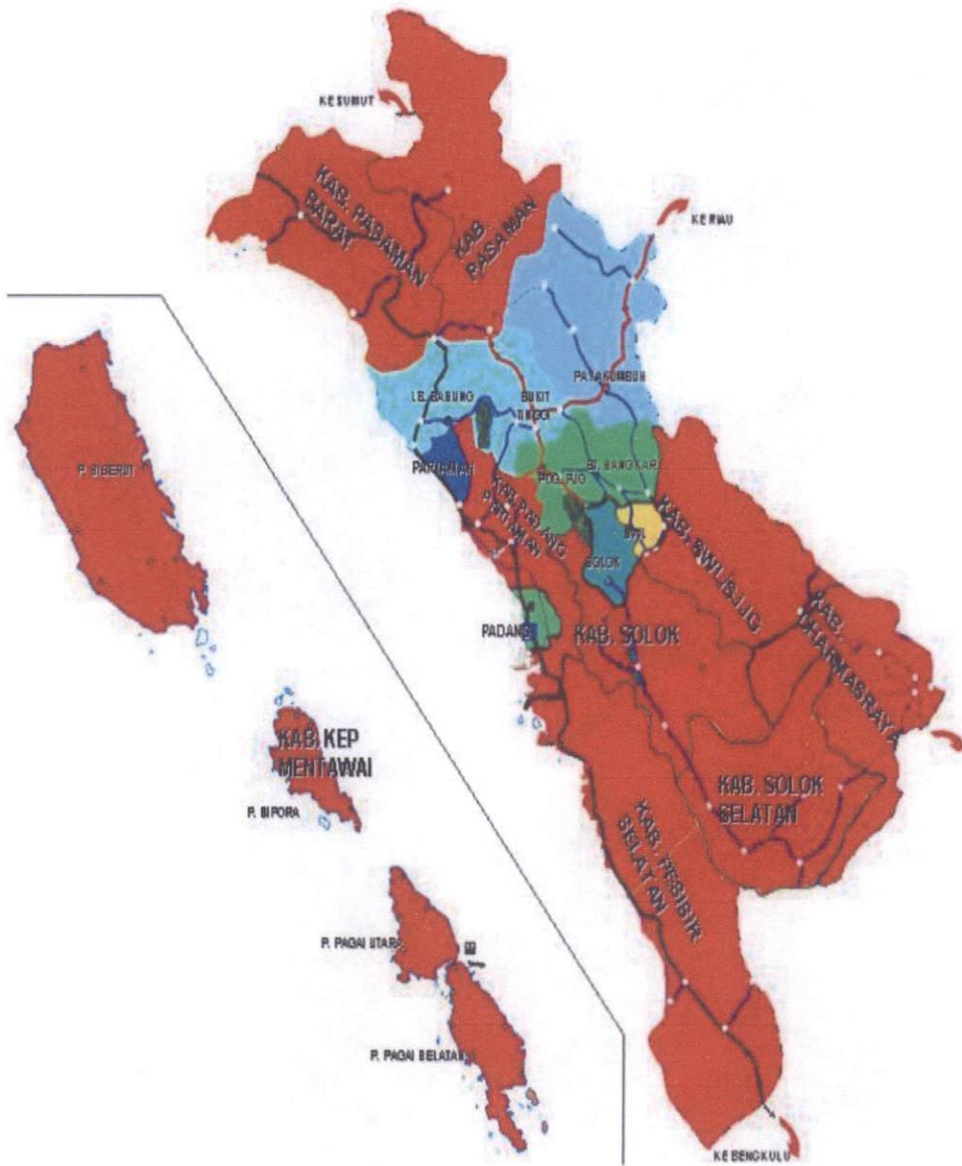
- Adrimas. 1993. *Ekonomi Pembangunan*. Pusat Studi Antar Universitas (PAU). Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Anderson JR. 1997. *Reconsidering Agricultural Extension*. The World Bank Observer. Vol. 12. No. 2. August 1997: 249-259.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat. 2008. *Sumatera Barat Dalam Angka 2008*. BPS Propinsi Sumatera Barat. Padang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman. 2008. *Padang Pariaman Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Padang Pariaman. Pariaman.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. 2008. *Kabupaten Solok Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Kabupaten Solok. Arosuka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan. 2008. *Kabupaten Solok Selatan Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Solok Selatan. Padang Aro.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya. 2008. *Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Dharmasraya. Pulau Punjung.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. 2008. *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Pesisir Selatan. Painan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman. 2008. *Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Pasaman. Lubuk Sikaping.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. 2008. *Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Pasaman Barat. Simpang Empat.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. 2008. *Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Muaro Sijunjung.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2008. *Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2008*. BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tua Pejat.
- Bappeda Propinsi Sumatera Barat. 2007. *Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Propinsi Sumatera Barat 2008 - 2010*. Padang.
- Bappeda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. 2006. *Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung*. BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Muaro Sijunjung.
- Bappeda Propinsi Sumatera Barat. 2008. *Profil Daerah Propinsi Sumatera Barat 2008*. Padang.
- Bappeda Propinsi Sumatera Barat. 2008. *Laporan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal 2008*. Padang.
- Boediono. 1983. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Daisy Catriantina. 1990. *Kredit sebagai sarana peningkatan produksi bagi petani karet di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Deddy K. 2006. *Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru*. Info Kajian Bappenas. Bappenas. Jakarta.
- Dodik Ridho Nurrochman. 2006. *Mengintegrasikan Aspek Lingkungan dan Aspek Ekonomi Dalam Kebijakan Pembangunan*. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Edi Basuno. 2007. *Kaji Tindak (Action Research) Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Daerah Tertinggal*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Department Pertanian. Jakarta.

- Elis F. 1994. *Agricultural Policies in Developing Countries*. Wye Studies in Agricultural and Rural Development. Cambridge University Press.
- Fashbir Noor Sidin. 2001. *Strategi Kebijakan Pembangunan Dalam Era Otonomi Daerah*. Padang. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Edisi IX No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Freedy Rangkuti. 1997. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hayami Y. 1984. *Toward a theory of induced institutional innovation*. Journal of Development Studies. Vol. 20: 203-22. .
- Helmy Faishal Zainy. 2010. *Tindakan Afirmatif untuk Pembangunan Daerah Tertinggal*. <http://www.Tempointeraktif.com>. [4 Mei 2010]
- Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. 2007. *Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS – PPDT) 2007*. Jakarta.
- Lincoln Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Merry Theresia. 2006. *Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Studi Kasus : Sub Sektor Hotel, Sub Sektor Restoran dan Sub Sektor Hiburan Rekreasi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- M.L.Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Robinson Tarigan. 2005. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suroso. 1997. *Permasalahan Pembangunan Daerah*. Fakultas Ekonomi Univeritas Airlangga. Surabaya.

Tony Djogo,dkk. 2003. *Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. ICRAF. Bogor.

Lampiran I
Peta Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat



Keterangan :

 : Kabupaten Tertinggal

Lampiran II
Nama – Nama Nagari Tertinggal Pada 9 Kabupaten Tertinggal
Di Propinsi Sumatera Barat

Lampiran 2.1
Nama – Nama Nagari Tertinggal
Di Kabupaten Padang Pariaman

No	KECAMATAN	NAGARI	
1.	ENAM LINGKUNG	1.	Koto Tinggi
		2.	Pakandangan
		3.	Gadur
		4.	Parit Malintang
		5.	Toboh Ketek
2.	ULAKAN TAPAKIS	1.	Tapakis
		2.	Ulakan
3.	VII KOTO SUNGAI SARIAK	1.	Lurah Ampalu
		2.	Sungai Sarik
		3.	Balah Air
		4.	Lareh Nan Panjang
4.	SUNGAI GERINGGING	1.	Malai III Koto
		2.	Kuranji Hulu
5.	2X11KAYU TANAM	1.	Kepala Hilalang
		2.	Guguk
		3.	Anduring
		4.	Kayu Tanam
6.	V KOTO KAMPUNG DALAM	1.	Sikukur
		2.	Cimpago
7.	V KOTO TIMUR	1.	Gunung Padang Alai
8.	PATAMUAN	1.	Sungai Durian
		2.	Tandikek
9.	PADANG SAGO	1.	Koto Dalam
		2.	Koto Baru
		3.	Batu Kalang
10.	SINTUK TOBOH GADANG	1.	Toboh Gadang
		2.	Sintuk
11.	NAN SABARIS	1.	Sunur
		2.	Padang Bintungan
		3.	Kurai Taji
		4.	Pauh Kamba
12.	BATANG GASAN	1.	Gasam Gadang
		2.	Malai V Suku

13.	SUNGAI LIMAU	1.	Kuranji Hilir
		2.	Pilubang
14.	BATANG ANAI	1.	Sungai Buluh
		2.	Kataping
15.	2x11 ENAM LINGKUNG	1.	Sicincin
		2.	Lubuk Pandan
		3.	Sungai Asam
16.	LUBUK ALUNG	1.	Lubuk Alung
17.	IV KOTO AUR MALINTANG	1.	III Koto Aur Malintang
JUMLAH		42.	

Sumber: Bappeda Kabupaten Padang Pariaman, Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Padang Pariaman tahun 2008.

Lampiran 2.2
Nama – Nama Nagari Tertinggal
Di Kabupaten Solok

NO	KECAMATAN	NAGARI	
1.	PANTAI CERMIN	1.	Lolo
		2.	Surian
2.	HILIRAN GUMANTI	1.	Talang Babungo
		2.	Sariak Alahan Tigo
		3.	Sungai Abu
3.	PAYUNG SEKAKI	1.	Sirukam
		2.	Supayang
		3.	Aie Luo
4.	TIGO LURAH	1.	Rankiang Luruih
		2.	Batu Bajanjang
		3.	TJ.Balik Sumiso
		4.	Garabak Data
		5.	Simanau
5.	IX KOTO SEI.LASI	1.	Pianggu
		2.	Taruang-Taruang
		3.	Siaro-Aro
		4.	Indudur
		5.	Guguak Sarai
		6.	Sungai Durian
		7.	Bukik Bais
		8.	Koto Laweh
		9.	Sungai Jambur
6.	X KOTO DIATAS	1.	Katialo
		2.	Tanjung Balik
		3.	Paninjauan
		4.	Sulit Air
		5.	Pasilihan
		6.	Bukit Kanung
		7.	Kuncir
		8.	Siberambang
		9.	Labuh Panjang
7.	LEMBANG JAYA	1.	Koto Gdg.Koto Anau
		2.	Limau Linggo
		3.	Koto Lawas
		4.	Selayo Tanang/B.Sileh
		5.	Batu Bajanjang
8.	DANAU KEMBAR	1.	Kapung Batu Dalam
9.	GUNUNG TALANG	1.	Aia Batumbuak
		2.	Sungai Janiah

10.	BUKIT SUNDI	1.	Parambahan
		2.	Bukit Tandang
		3.	Muarapanas
11.	KUBUNG	1.	Panyakalan
		2.	Gauang
		3.	Saok Laweh
12.	X KOTO SINGKARAK	1.	Koto Sani
		2.	Kacang
13.	JUNJUNG SIRIH	1.	Paninggahan
		2.	Muaro Pingai
	JUMLAH	49.	

Sumber: Bappeda Kabupaten Solok, Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Solok tahun 2008

Lampiran 2.3
Nama – Nama Nagari Tertinggal
Di Kabupaten Solok Selatan

NO	KECAMATAN	NAGARI	
1.	SANGIR BATANG HARI	1.	Abai
		2.	Dusun Tengah
		3.	Lubuak Ulang-Aling
2.	SANGIR JUJUAN	1.	Lubuak Malako
		2.	Bidar Alam
		3.	Sungai Kunyit
3.	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1.	Pakan Rabaa
4.	SANGIR	1.	Lubuk Gadang
5.	SUNGAI PAGU	1.	Alam Pauh Duo
		2.	Koto Baru
		3.	Pasia Talang
		4.	Sako Pasia Talang
	JUMLAH	12.	

Sumber: Bappeda Kabupaten Solok Selatan, Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Solok Selatan tahun 2008

Lampiran 2.4
Nama – Nama Nagari Tertinggal
Di Kabupaten Dharmasraya

NO	KECAMATAN	NAGARI
1.	PULAU PUNJUNG	1. Silago
		2. Lubuk Karang
2.	SITIUNG	1. Siguntur
		2. Timpeh
3.	KOTO BARU	1. Sialang Gaung
		2. Tiumang
		3. Padang Laweh
		4. Koto Salak
4.	SUNGAI RUMBAI	1. Sungai Limau
Jumlah		7

Sumber: Bappeda Kabupaten Dharmasraya, Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Dharmasraya tahun 2008

Lampiran 2.5
Nama – Nama Nagari Tertinggal
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	KECAMATAN	NAGARI	
1.	LUNANG SILAUT	1.	Lunang
		2.	Silaut
2.	BAB TAPAN	1.	Tapan
3.	PANCUNG SOAL	1.	Inderapura
4.	LINGGO SARI BAGANTI	1.	Punggasan
		2.	Air Haji
5.	RANAH PESISIR	1.	Sungai Tunu
		2.	Pelangai
6.	LENGAYANG	1.	Lakitan
		2.	Kambang
7.	SUTERA	1.	Amping Parak
		2.	Surantih
8.	BATANG KAPAS	1.	Taluk
		2.	IV Koto Hilir
		3.	IV Koto Mudik
9.	IV JURAI	1.	Painan
		2.	Tambang
		3.	Lumpo
10.	BAYANG	1.	Pasar Baru
		2.	Gurun Panjang
		3.	Talaok
		4.	Koto Barapak
11.	IV NAGARI BAYANG	1.	Pulut-pilut
	UTARA		
		2.	Koto Ranah
		3.	Muaro Air
		4.	Pancung Tabah
12.	KOTO XI TARUSAN	1.	Sungai Pinang
		2.	Ampang Pulai
		3.	Kapuh
		4.	Duku
		5.	Barung-barung Belanti
		6.	Nanggalo
		7.	Taratak Sungai Lundang
	JUMLAH	33.	

Sumber: Bappeda Kabupaten Selatan, Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008

Lampiran 2.6
Nama – Nama Nagari Tertinggal
Di Kabupaten Pasaman

NO.	KECAMATAN	NAGARI	
1.	TIGO NAGARI	1.	Binjai
		2.	Ladang Panjang
		3.	Malampah
2.	SIMPATI	1.	Simpang
		2.	Alahan Mati
3.	BONJOL	1.	Koto Kaciak
		2.	Limo Koto
		3.	Ganggo Hilie
		4.	Ganggo Mudiak
4.	LBK SIKAPING	1.	Tanjung Beringin
		2.	Aia Manggih
		3.	Sundata
5.	PANTI	1	Panti
6.	PADANG GELUGUR	1.	Padang Gelugur
7.	RAO SELATAN	1.	Lansek Kodok
		2.	Tanjung Betung
		3.	Lubuak Layang
8.	RAO	1.	Taruang – Taruang
		2.	Padang Mentinggi
9.	RAO UTARA	1.	Languang
		2.	Koto Rajo
		3.	Koto Nopan
10.	MAPAT TUNGGUL	1.	Pintu Padang
		2.	Muaro Tais
		3.	Lubuak Gadang
11.	MAPAT TUGGUL SELATAN	1.	Silayang
		2.	Muaro Sungai Lolo
12.	DUO KOTO	1.	Cubadak
		2.	Simpang Tonang
	JUMLAH	29	

Sumber: Bappeda Kabupaten Pasaman, Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pasaman tahun 2008.

Lampiran 2. 7
Nama – Nama Nagari Tertinggal
Di Kabupaten Pasaman Barat

NO	KECAMATAN	NAGARI	
1.	SASAK RANAH PASISIA	1.	Sasak
2.	KINALI	1.	Katiagan/Mandiingin
3.	TALAMAU	2.	Kajai
			Sinuruik
4.	GUNUNG TULEH	1.	Rabi Jonggor
5.	SUNGAI AUR	1.	Sungai Aur
6.	LEMBAH MALINTANG	1.	Ujung Gading
7.	KOTO BALINGKA	1.	Koto Balingka
8.	RANAH BATAHAN	1.	Batahan
9.	SUNGAI BEREMAS	1.	Air Bangis
	JUMLAH	10.	

Sumber: Bappeda Kabupaten Pasaman, Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pasaman tahun 2008

Lampiran 2.8
Nama – Nama Nagari Tertinggal
Di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

NO	KECAMATAN	NAGARI
1.	KUPITAN	1. Batu Manjukur
2.	IV NAGARI	1. Koto Tuo
		2. Mundam Sakti
3.	SUMPUR KUDUS	1. Sumpur Kudus
		2. Silantai
		3. Unggan
		4. Manganti
		5. Sisawah
		6. Tamparungo
		7. Tanjung Bonai Aur
4.	KOTO VII	1. Tanjuang
		2. Padang Laweh
		3. Guguk
		4. Palaluar
5.	SIJUNJUNG	1. Muaro
		2. Kandang Baru
		3. Aie Angek
		4. Solok Ambah
		5. Silokek
		6. Durian Gadang
		7. Paru
6.	LUBUAK TAROK	1. Buluh Kasok
		2. Lubuak Tarok
		3. Lalan
7.	TANJUNG GADANG	1. Langki
		2. Tanjung Lolo
		3. Sibakur
		4. Pulasan
		5. Taratak Baru
		6. Timbulun
8.	KAMANG BARU	1. Sungai Lansek
		2. Kamang
		3. Aie Amo
		4. Sungai Batuang
		5. Muaro Takuang
		6. Kunangan Parik Rantang
	JUMLAH	36

Sumber: Bappeda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tahun 2008

Lampiran 2.9
Nama – Nama Nagari Tertinggal
Di Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO.	KECAMATAN	DESA TERTINGGAL
1.	PAGAI UTARA /SELATAN	1. Bulasat
		2. Makalo
		3. Taikako
		4. Malakopak
		5. Matobek
		6. Saumanganyak
		7. Sinakak
		8. Silabu
		9. Betumonga
2.	SIPORA	1. Bosua
		2. nem-nem leleu
		3. Beriuleu
		4. Mara
		5. Betumonga
		6. Saureinuk
		7. Matobe
		8. goiso oinan
		9. upt tua pejat ii
		10. sipora jaya
		11. bukit pamewa
3.	SIBERUT SELATAN	1. pasakiat teleleu
		2. madobak ugai
		3. Katurei
		4. silaguma (silacinan tanga
		5. Sarereiket
		6. sagulubbek
		7. saibi samukop
		8. Matotonan
		9. Maileppet
4.	SIBERUT UTARA	1. simatalu sipokak
		2. Cimpungan
		3. Sirilogui
		4. mongan poula

		5.	Sotboyak
		6.	Bojakan
		7.	simalegi tengah
		8.	Malancan
		9.	Sigapokna
		38.	

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2008

Lampiran III

Hasil Perhitungan LQ 9 Kabupaten Tertinggal di Propinsi Sumatera Barat

Tahun 2002 - 2008

$$LQ_{ij} = \frac{Y_{ij} / \sum_{i=1}^n Y_{ij}}{\sum_{j=1}^m Y_{ij} / \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m Y_{ij}}$$

LQ = Location Quetiont/ koefisien lokasi

Y_{ij} = Nilai tambah dari sektor i di satu wilayah (sub wilayah/kabupaten)

$\sum_{j=1}^m Y_{ij}$ = Nilai tambah sektor i secara regional (propinsi)

$\sum_{i=1}^n Y_{ij}$ = Total Output (PDRB) seluruh sektor di satu wilayah (sub wilayah/kabupaten)

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m Y_{ij}$ = Total Output (PDRB) seluruh sektor secara regional (propinsi)

i = 1,2,3,...n (sektor)

j = 1,2,3,...m (sektor)

Jika:

$LQ > 1$ artinya sektor i merupakan sektor unggulan/basis

$LQ < 1$ artinya sektor i merupakan sektor non basis.